



LAPORAN KINERJA TRIWULAN I 2024

DEPUTI BIDANG KOORDINASI
SUMBER DAYA MARITIM

KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Capaian Kinerja (LAKIP) Triwulan I Tahun 2024 Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) dapat terselesaikan dengan baik. Dokumen ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim yang telah ditandatangani oleh Menko Maritim dan Investasi pada tanggal Bulan Februari 2024. Terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator

Kinerja Utama (IKU).

LAKIP ini berisi progres pelaksanaan kegiatan dimasing-masing SS dalam mendukung capaian IKU. Data dan informasi capaian kinerja dimaksud dari periode 1 Januari s.d. 31 Maret 2024. Laporan capaian kinerja ini kami harapkan dapat memberikan gambaran terkait dengan kinerja yang sudah dicapai oleh Deputi SD Maritim hingga Triwulan I Tahun 2024.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan sumbangsih saran dan pemikiran dalam penyusunan Laporan Capaian Kinerja Triwulan II ini. Kritik dan saran sangat kami perlukan untuk perbaikan dokumen Laporan Capaian Kinerja periode berikutnya.

Jakarta, 1 April 2024
Deputi Bidang Koordinasi
Sumber Daya Maritim,



Mochammad Firman Hidayat

DAFTAR ISI

1. PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi.....	1
2. RENCANA KINERJA.....	6
2.1. Sasaran Strategis (SS).....	6
2.2. Indikator dan Target Kinerja.....	8
2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja.....	8
2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja.....	8
2.2.3 Kegiatan dan Anggaran.....	11
3. AKUNTABILITAS KINERJA.....	13
3.1. Capaian Kinerja Organisasi.....	13
3.1.1 Sasaran Program 1 (SP.1).....	16
3.1.2 Sasaran Program 2 (SP.2).....	21
3.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS.3).....	47
3.2. Realisasi Anggaran.....	48
4. PENUTUP.....	1

1. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Penyelenggaraan SAKIP dilakukan dengan menyusun dan menyajikan Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan Penggunaan Anggaran yang telah dialokasikan, hal tersebut sesuai dengan amanat pasal (5) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja Interim adalah Laporan Kinerja Triwulanan yang disampaikan untuk mengukur capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan saat penyusunan Perjanjian Kinerja (PK).

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) merupakan unit kerja yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi yang terdiri dan didukung dari 6 Unit Kerja Eselon II, yang adalah Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya, Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing dan Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam mendukung capaian kinerja yang tertuang dalam 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja Utama (IKU). Target waktu capaian PK Deputi SD Maritim ditetapkan pada setiap triwulan dengan triwulan 1-4 didapatkan output antara pada triwulan 4 output dan outcome akhir dihasilkan dan 3 output pada Triwulan III. sehingga untuk Laporan Kinerja TW I merupakan progress capaian dan serta pelaporan output antara dalam mendukung capaian kinerja yang dihasilkan oleh Deputi SD Maritim pada TA 2024.

1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, salah satu unit Eselon I dalam struktur organisasi tersebut adalah Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Tugas dan fungsinya adalah menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di bidang Sumber Daya Maritim. Sedangkan fungsi Deputi SD Maritim, adalah:

1. Koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu bidang Sumber Daya Maritim;
2. Pengendalian pelaksanaan kebijakan K/L yang terkait dengan isu di Bidang Sumber Daya Maritim;
3. Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang Sumber Daya Maritim;
4. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri Koordinator.

Unit kerja dipimpin oleh satu orang Deputy dan dibantu oleh 6 (enam) orang pejabat eselon II. Ke-6 pejabat tersebut mengawal urusan dalam bidang pengelolaan ruang laut dan pesisir, bidang perikanan tangkap, bidang perikanan budidaya, bidang peningkatan daya saing dan bidang hilirisasi sumber daya maritim serta urusan kesekretariatan.

Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir

Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang penataan ruang dan zonasi, pengelolaan jasa kelautan, serta pengelolaan konservasi perairan dan pendayagunaan pulau-pulau kecil.

Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir terdiri atas:

- a. Bidang Penataan Ruang dan Zonasi
- b. Bidang Pengelolaan Jasa Kelautan
- c. Bidang Pengelolaan Konservasi Perairan dan Pendayagunaan Pulau-Pulau Kecil; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap

Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan sumber daya ikan, tata kelola penangkapan ikan, serta sarana prasarana penangkapan ikan.

Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Ikan;
- b. Bidang Tata Kelola Penangkapan Ikan;
- c. Bidang Sarana Prasarana Penangkapan Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengelolaan kawasan budidaya perikanan, perbenihan dan sarana produksi budidaya, serta sarana prasarana dan pembudidaya ikan.

Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya terdiri atas:

- a. Bidang Pengelolaan Kawasan Budidaya Perikanan;
- b. Bidang Perbenihan dan Sarana Produksi Budidaya;
- c. Bidang Sarana Prasarana Pembudidaya Ikan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk

kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan;

- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang logistik produk kelautan dan perikanan, pengelolaan dan bina mutu produk kelautan dan perikanan, serta pemasaran produk kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Peningkatan Daya Saing terdiri atas:

- a. Bidang Logistik Produk Kelautan dan Perikanan;
- b. Bidang Pengelolaan dan Bina Mutu Produk Kelautan dan Perikanan;
- c. Bidang Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan;
- b. penyiapan pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan; dan
- c. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang hilirisasi industri kelautan, hilirisasi industri perikanan, dan hilirisasi penunjang industri kelautan dan perikanan.

Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim terdiri atas:

- a. Bidang Hilirisasi Industri Kelautan;
- b. Bidang Hilirisasi Industri Perikanan;
- c. Bidang Hilirisasi Penunjang Industri Kelautan dan Perikanan; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Sekretaris Deputi menyelenggarakan fungsi:

- a. koordinasi penyusunan rencana program, anggaran, dan capaian kinerja;
- b. pemantauan, analisis dan evaluasi program, anggaran, dan capaian kinerja;
- c. pemberian dukungan pengelolaan data dan sistem informasi;
- d. pemberian dukungan administrasi dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, kerja sama, ketatausahaan, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, kearsipan dan keuangan;
- e. pemberian dukungan pengelolaan rumah tangga, perlengkapan, dan barang/jasa, serta penatausahaan barang milik negara;
- f. koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. koordinasi dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi.

Sekretariat Deputi terdiri atas:

- a. Bagian Program;
- b. Bagian Administrasi Umum; dan
- c. Kelompok Jabatan Fungsional.

2. RENCANA KINERJA

2.1. Sasaran Strategis (SS)

Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai oleh instansi pemerintah secara spesifik, terukur dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. Proses mencapai sasaran diberikan indikator sebagai ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran untuk diwujudkan pada tenggang waktu yang telah ditargetkan. Sasaran pembangunan jangka menengah Deputi Sumber Daya Maritim (Deputi SD Maritim) tahun 2020-2024 diarahkan untuk:

1. Terwujudnya percepatan pengelolaan penataan ruang laut pesisir yang terpadu;
2. Terwujudnya pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap yang berkelanjutan;
3. Terwujudnya pengembangan produksi perikanan budidaya yang optimal;
4. Terwujudnya pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan yang berkelanjutan;
5. Tercapainya hilirisasi industri kelautan, perikanan dan penunjangnya yang berkelanjutan.

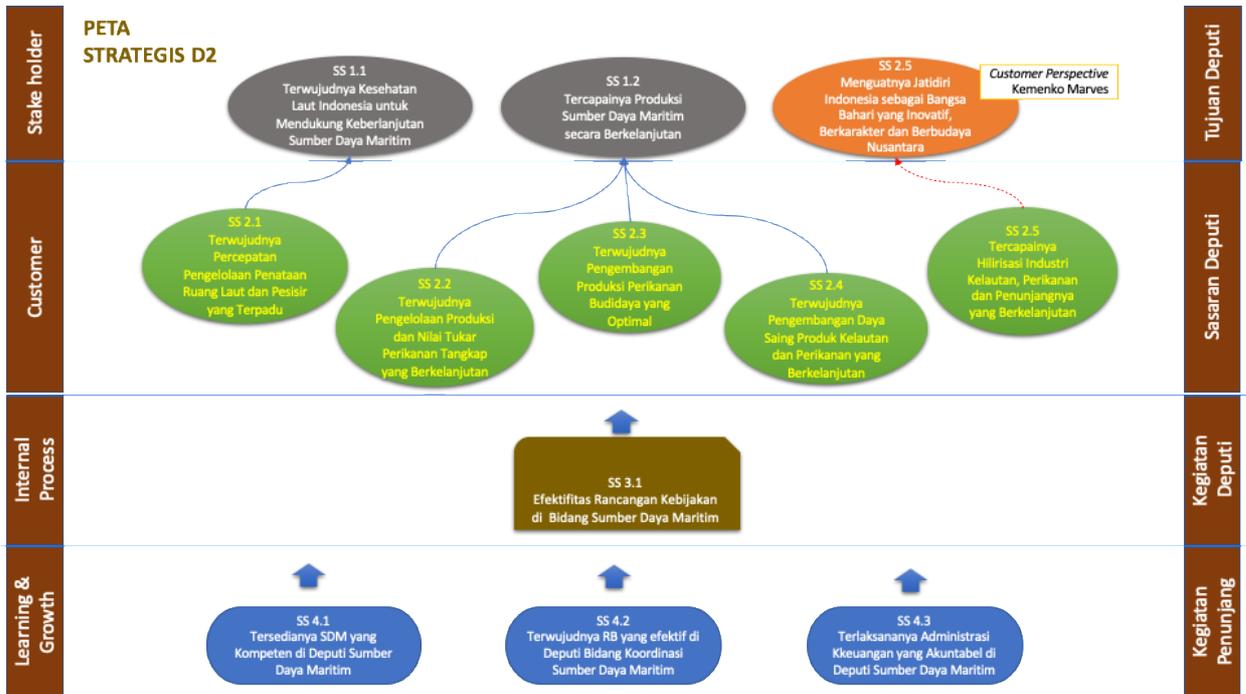
Sasaran Strategis yang tertuang dalam Peta Strategis (lihat gambar 2) untuk mendukung pencapaian visi dan misi Deputi SD Maritim menggunakan pendekatan *Balance Scorecard* (BSC) yang dibagi kedalam 4 (empat) perspektif yaitu perspektif pemangku kepentingan (*stakeholder perspective*), perspektif pengguna (*customer perspective*), perspektif proses bisnis internal (*internal business process perspective*) dan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan (*learning and growth perspective*).

Fokus dari peta strategis tersebut adalah pencapaian tujuan untuk memberikan kepuasan kepada pemangku kepentingan dengan 2 (dua) sasaran strategis utama yaitu:

- 1) Terwujudnya kesehatan laut Indonesia untuk mendukung keberlanjutan sumber daya maritim untuk mendukung SS 2.3 Kemenko Marves yaitu "Meningkatnya Produktivitas dan Kualitas Lingkungan dan Perairan Indonesia" akan terwujud, jika pelaksanaan percepatan pengelolaan ruang laut dan pesisir dilaksanakan secara terpadu.
- 2) Tercapainya produksi sumber daya maritim secara berkelanjutan untuk mendukung SS 2.4 Kemenko Marves yaitu "Meningkatnya Produksi Barang dan Jasa serta Nilai Tambah Sumber Daya Alam" akan terwujud, jika pengelolaan produksi dan nilai tukar perikanan tangkap secara berkelanjutan, pengembangan produksi perikanan budidaya secara

optimal dan pengembangan daya saing produk kelautan dan perikanan secara berkelanjutan.

Sasaran strategis Deputi: "Tercapainya Hilirisasi Industri Kelautan, Perikanan dan Penunjangnya yang Berkelanjutan" adalah turunan untuk mendukung SS 2.5 Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi "Meningkatnya Jati Diri Indonesia sebagai Bangsa Bahari yang Inovatif, Berkarakter dan Berbudaya Nusantara".



Gambar 1. Peta Strategis Deputi SD Maritim 2020-2024

Sasaran Strategis merupakan ukuran untuk mencapai tujuan organisasi. SS Deputi SD Maritim tahun 2022 dibagi kedalam 4 perspektif yang dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Sasaran Strategis Deputi Sumber Daya Maritim Tahun 2024

SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien

2.2. Indikator dan Target Kinerja

2.2.1 Indikator Kinerja dan Target Kinerja

Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan. Indikator kinerja memberikan penjelasan, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif, mengenai apa yang diukur untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Berdasarkan Perjanjian Kinerja (PK) Deputi SD Maritim terdapat 3 (tiga) Sasaran Strategis (SS) dengan 6 (enam) Indikator Kinerja. Rincian SS, Indikator Kinerja dan Target Tahunan dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. SS, IKU dan Target Kinerja Deputi SD Maritim Tahun 2024

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA		TARGET TAHUNAN
SS.1	Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing	1	Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	100%
		2	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	76
SS.2	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim	3	Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	100%
		4	Persentase Isu-Isu Strategis yang Diselesaikan	100%
SS.3	Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien	5	Nilai PMPZI Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	86
		6	Nilai SAKIP Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	76

2.2.2 Penghitungan Capaian Kinerja

1. IKU.1 Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan.

Persentase Capaian Produksi Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dihitung berdasarkan perbandingan capaian akumulasi produksi perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2024 dengan akumulasi produksi

perikanan budidaya dan tangkap serta nilai ekspor perikanan pada tahun 2024. Target yang digunakan berdasarkan pada Dokumen RKP 2024.

Formula:

$$\frac{\begin{array}{l} \text{Jumlah Produksi Perikanan} \\ \text{Budidaya Tahun 2024} + \\ \text{Jumlah Produksi Perikanan} \\ \text{Tangkap Tahun 2024} \\ \hline \text{Target Produksi Perikanan} \\ \text{Budidaya Tahun 2024} + \\ \text{Target Produksi Perikanan} \\ \text{Tangkap Tahun 2024} \end{array}}{2} + \frac{\begin{array}{l} \text{Capaian Nilai Ekspor Perikanan} \\ \text{Tahun 2024} \\ \hline \text{Target Nilai Ekspor Perikanan} \\ \text{Tahun 2024} \end{array}}{\times 100\%}$$

2. **IKU.2 Indeks Kesehatan Laut Indonesia**

Pengukuran IKLI berdasarkan dari 10 tujuan yang diadopsi dari OHI yang kemudian dari 10 tujuan tersebut dijabarkan menjadi variabel-variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran sehingga didapatkan perhitungan index IKLI. Yang dimaksud pada 10 tujuan tersebut adalah

1. Laut Sebagai Sumber Pangan
2. Laut Untuk Perikanan Skala Kecil
3. Laut Sebagai Sumber Produk Alam
4. Laut Sebagai Penyimpan Karbon
5. Laut Sebagai Perlindungan Pesisir
6. Laut Sebagai Sumber Matapencarian dan Ekonomi
7. Laut Sebagai Penyedia Jasa Pariwisata dan Rekreasi
8. Laut Sebagai Tempat Perlindungan dan Tempat Ikonis
9. Laut Sebagai Perairan Yang Bersih
10. Keanekaragaman Hayati

Formula:

IKLI Agregat

$$\begin{aligned} &= \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 1} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 2} \\ &+ \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 3} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 4} \\ &+ \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 5} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 6} \\ &+ \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 7} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 8} \\ &+ \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 9} + \text{Nilai Variabel IKLI Tujuan 10} \end{aligned}$$

3. **IKU.3 Persentase Rancangan Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti**

Persentase rekomendasi kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti merupakan perbandingan jumlah rekomendasi kebijakan yang ditindaklanjuti dengan total dari rekomendasi kebijakan.

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti}}{\text{Total Rancangan Kebijakan Sumber Daya Maritim}} \times 100\%$$

4. **IKU.4 Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan**

Persentase isu-isu strategis yang diselesaikan merupakan capaian yang didapatkan dari perbandingan jumlah isu-isu strategis yang diselesaikan dengan total dari isu-isu strategis yang akan diselesaikan

Formula:

$$\frac{\text{Jumlah Isu – Isu Strategis yang diselesaikan}}{\text{Total Isu – Isu Strategis}} \times 100\%$$

5. **IKU.5 Nilai PMPZI pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas (PMPZI) merupakan instrumen penilaian kemajuan pelaksanaan pembangunan zona integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) yang dilakukan secara mandiri yang dinilai berdasarkan penilaian PMPZI dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi

Formula:

Penilaian terhadap implementasi ZI Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

6. **IKU.6 Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim**

Nilai Evaluasi Internal Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim dihitung berdasarkan dari penilaian SAKIP yang dihasilkan berdasarkan penilaian dari Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman & Investasi atas aktivitas analisis yang sistematis, pemberian nilai, atribut, apresiasi, dan pengenalan permasalahan, serta pemberian solusi atas masalah yang ditemukan untuk tujuan peningkatan akuntabilitas dan kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim

Formula:

Penilaian Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.

2.2.3 Kegiatan dan Anggaran

Dalam mendukung capaian SS Deputi SD Maritim terdapat 7 (tujuh) Kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp. 16.700.000.000,-. Rincian kegiatan dan alokasi anggaran dapat dilihat pada Tabel 3:

Tabel 3. Rincian Kegiatan dan Alokasi Anggaran Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.200.000.000,-
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 3.500.000.000,-
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-
JUMLAH ANGGARAN		Rp. 16.700.000.000,-

Berdasarkan Surat Plh. Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi nomor : 19/Marves/Sesmenko/ND/2024, pada Tahun 2024 diberlakukan *Automatic Adjustment* Belanja Kementerian/Lembaga. Anggaran efektif Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim adalah sebagai berikut:

Tabel 4. Alokasi Anggaran Efektif Tahun 2024

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-	Rp245.075.000,-	1.754.925.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 3.500.000.000,-	Rp518.480.000,-	2.981.520.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp180.000.000,-	2.020.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 16.500.000.000,-	Rp. 2.021.895.000,-	Rp14.478.105.000

3. AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Berikut adalah hal-hal yang telah dicapai pada Triwulan I Tahun 2024 guna mencapai target kinerja yang telah diperjanjikan pada PK Deputi Koordinasi SD Maritim TA 2024:

Tabel 5. Rangkuman Pelaksanaan Progres Kegiatan per TW I Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Capaian Triwulan I 2024
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	Indeks Kesehatan Laut Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan rapat koordinasi untuk melakukan updating data IKLI 2023 Adanya pembahasan mengenai inisiasi IKLI untuk provinsi
2	Ruang Laut dan Pesisir	Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan rapat koordinasi mengenai Konsolidasi Rencana Kerja Tahun 2024 lintas Instansi/Unit Kerja di bawah Koordinasi Kemenko Marves Telah dilakukan Rapat Koordinasi Pembelajaran Implementasi Green List di Nusa Penida dengan Coral Triangle Center (CTC)
			Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilakukan koordinasi mengenai rapat persiapan dalam pengelolaan penyelenggaraan pipa kabel bawah laut Rapat koordinasi penyusunan proses bisnis penyelenggaraan alur pipa dan kabel bawah laut Telah dilakukan Sosialisasi Proses Bisnis Penyelenggaraan Alur Pipa dan atau Kabel Bawah Laut
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengelolaan Perikanan Tangkap yang ditindaklanjuti	Rancangan Kebijakan Tata Kelola dan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Penyelesaian Permasalahan Sewa Lahan PT Perindo di Pelabuhan Nizam Zachman Rapat Koordinasi Finalisasi SK Tim Optimalisasi Kompetensi dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Capaian Triwulan I 2024
				<ul style="list-style-type: none"> Kunjungan Lapangan dalam rangka Inspeksi Bersama Awak Kapal Perikanan
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	<p>Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Pelabuhan dan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional</p> <p>Koordinasi Penangkapan Ikan Terukut</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Pembangunan IFP-IFM Fase-1 (PHLN JICA) Rapat Koordinasi Kebijakan PIT dengan KKP Kunjungan dan Koordinasi Kebijakan PIT di Sulawesi Utara Koordinasi Kesiapan Kuota
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Pengembangan Perikanan Budidaya yang ditindaklanjuti	Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Fasilitasi piloting investasi budidaya rumput laut skala besar (100 ha)
2	Pengembangan Perikanan Budidaya	Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	<p>Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang dan Bandeng</p> <p>Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu - Hilir</p>	<ul style="list-style-type: none"> Rapat Koordinasi Inisiasi Pembentukan Komisi Irigasi Terbitnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 611/10 Tahun 2023 tentang Komisi Irigasi Provinsi Jawa Tengah Periode 2023 - 2026 Pelaksanaan Show Case Budidaya Rumput Laut Skala Besar Terintegrasi Hulu-Hilir di Provinsi NTB kepada Presiden RI Rapat Koordinasi Penetapan Center of Excellence Komoditas Rumput Laut) Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Usaha Budidaya Rumput Laut Skala Besar Lanjutan (Midline)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Capaian Triwulan I 2024
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Peningkatan Daya Saing yang ditindaklanjuti	Rancangan Kebijakan Penguatan Pemasaran Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Pengembangan Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan Global • Workshop Trade Remedies • Penyelesaian Sengketa Perdagangan Udang ke Amerika Serikat • Kajian Potensi Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan diluar Pasar Tradisional
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Steering Comitee dan Technical Comitee (SC dan TC) • Updating Program Kegiatan dari Mitra Pembangunan, PBB dan K/L
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	Rancangan Rekomendasi Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Koordinasi Capaian Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2024 • Pembahasan Kebutuhan Garam Farmasi melalui Hasil Produksi Garam Dalam Negeri • Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Kesiapan Produksi Garam Farmasi Dalam Negeri untuk Pemenuhan Kebutuhan Garam untuk Kebutuhan Garam Industri Farmasi di Jawa Timur • Rapat Koordinasi dan Kunjungan Lapangan Inovasi Teknologi Desalinasi Air Laut di Banten
2		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam	<ul style="list-style-type: none"> • Rakor Penyusunan Tim Kerja Pelaksanaan Kerja Sama Eksplorasi Laut, Edukasi Publik dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Maritim di Jakarta • Rakor Teknis Perizinan Kapal dan Media di Jakarta • Rakor Teknis detail program Riset, Edukasi dan Media IEM 2024 di Jakarta • Rakor persiapan kegiatan Young Explorer Program

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Judul Kinerja	Capaian Triwulan I 2024
				dan Floating School di Bogor
1	Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Persentase Rumusan Kebijakan di Bidang Hilirisasi Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti	Rancangan Kebijakan Proyek Prioritas Strategis Nasional (<i>Major Project</i>) Bidang Sumber Daya Maritim	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Identifikasi Permasalahan Major Project Sektor Sumber Daya Maritim • Rapat Penyusunan Rencana Kerja Pengendalian Major Project Sektor Sumber Daya Maritim • Rapat Penelaahan atas Identifikasi Permasalahan Major Project Sektor Sumber Daya Maritim
2			Rancangan Kebijakan Kelautan Global (Ocean20)	<ul style="list-style-type: none"> • Rapat Persiapan dan Evaluasi O20 TA 2023 • Rapat Penyusunan Rencana Kerja O20 pada Presidensi G20 Brazil • Rapat Penyusunan Posisi Indonesia terhadap O20 Engagement Group pada G20 Brazil
3		Persentase Isu-Isu Strategis yang diselesaikan	Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara	<ul style="list-style-type: none"> • Pengawasan penerbitan SK Tagih Pasal 110A dan Pasal 110B • Penyelesaian tumpang tindih HGU dan Kawasan Hutan • Penyelenggaraan piloting di 10 Provinsi

Berikutnya pada setiap kinerja, berikut adalah penjelasan setiap output antara yang dihasilkan dengan kendala serta tindak lanjut pada triwulan berikutnya:

3.1.1 Sasaran Program 1 (SP.1)

Terwujudnya Pengelolaan Sumber Daya Maritim yang Berkelanjutan dan Berdaya Saing

1. Indikator Kinerja 1 adalah “**Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan**”

Indikator ini menggambarkan Persentase Capaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan. Capaian ini ditargetkan persentasenya dicapai pada TW IV TA 2024 dengan target capaian 100%. Capaian ini berasal dari kegiatan Pengendalian

Kebijakan Pengembangan Sarana Prasarana Perikanan Tangkap yang Berkelanjutan, Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan.

Berikut merupakan progress atau capaian pada Triwulan 1

- **Produksi Perikanan Budidaya**

Kegiatan yang dilaksanakan berfokus pada pengembangan rumput laut, berikut progress yang dilaporkan:

- Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi telah memulai pilot project budidaya rumput laut terintegrasi hulu-hilir berskala besar di Kabupaten Lombok Timur, NTB. Proyek ini, yang mencakup area luas hingga 100 Ha, menggunakan teknologi meanisasi dari proses budidaya hingga pengolahan, dengan fokus utama pada produksi biostimulan dan bioplastik.
- Telah dilakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait untuk menangani permasalahan hilirisasi rumput laut, seperti penyediaan bibit berkualitas, pemetaan potensi lahan, dan penyederhanaan perizinan usaha.
- Kementerian Kelautan dan Perikanan telah menyiapkan lima lokasi percontohan hilirisasi rumput laut, dengan Wakatobi, Maluku Tenggara, Buleleng, Rote Ndao, dan Lombok.
- Fokus utama adalah memastikan penyediaan benih rumput laut berkualitas, dengan dukungan dari 6 laboratorium kultur jaringan yang tersebar di seluruh Indonesia.

- **Produksi Perikanan Tangkap**

Berikut merupakan progress yang telah dilakukan pada Triwulan I:

- Telah dilaksanakan rapat koordinasi untuk mengidentifikasi sejumlah tantangan dalam pengelolaan perikanan tangkap, seperti peningkatan jumlah kapal tanpa peningkatan mutu kesulitan mendapatkan ikan dengan ukuran yang semakin kecil, jarak penangkapan yang semakin jauh, serta konflik antar nelayan terkait alat penangkapan dan lokasi penangkapan. Selain itu, masalah lain termasuk pertumbuhan ekonomi yang tidak merata akibat manfaat Sumber Daya Ikan (SDI) yang tidak merata dan pelanggaran operasional penangkapan ikan. Pada tahun 2024, belum diterapkan kuota kontrol, namun penangkapan ikan berbasis kuota diperlukan untuk merespons penurunan stok ikan akibat penangkapan berlebihan, IUUF, penurunan mutu ikan, dan ketidak-efisienan rantai bisnis. Terdapat pula 296 pelabuhan pangkalan dengan minimal 10 orang enumerator pada setiap pangkalan, dengan pemerintah memberikan keberpihakan kepada nelayan melalui kuota industri yang diberikan di atas 12 mil tanpa PNBP jika kapal beroperasi di atas 12 mil tetapi dengan GT di bawah 10 GT. Selanjutnya, diperlukan evaluasi pendekatan perizinan terhadap stok perikanan, pemanfaatan metode berbasis data untuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan, serta

implementasi jenis-jenis kebijakan dan regulasi seperti perizinan, pajak, kuota, marine protected area, marine ranching, dan restocking.

- Nilai Ekspor Perikanan

Berikut merupakan progress yang dilakukan pada Triwulan I:

- beberapa kebijakan telah diusulkan, termasuk mengembangkan dasar hukum yang kuat untuk investasi asing, menyederhanakan proses perizinan, meningkatkan akses pembiayaan, dan memperbaiki infrastruktur penyimpanan dingin.
- Telah dilakukan kunjungan untuk yang mana di Kabupaten Buleleng, Bali, potensi perikanan tangkap dan budidaya cukup besar, meliputi berbagai jenis ikan pelagis, udang, lobster, dan rumput laut. Namun, masih ada kendala seperti penanganan pasca panen yang kurang standar, kurangnya hilirisasi produk, dan akses pasar ekspor yang terbatas.
- Indonesia memiliki peluang untuk memperluas pangsa pasar ekspor perikanan, khususnya produk tuna, ke negara-negara seperti Arab Saudi dan Turki, dengan tetap bersaing dengan negara-negara pesaing seperti Vietnam dan Ekuador. Untuk mengakses pasar baru, seperti di Arab Saudi, sertifikasi halal dan persetujuan dari otoritas pangan setempat diperlukan. Kolaborasi dengan komunitas bisnis lokal dan fokus pada keunggulan produk Indonesia akan membantu meningkatkan daya saing di pasar global

Namun dalam capaian yang pada Trwiulan I terdapat kendala yang dihadapi yaitu pada pelaksanaan IKU Pencapaian Produksi dan Persentase Capaian Nilai Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan TW I Tahun 2024 adalah berkaitan dengan ketidakpastian regulasi, kompleksitas persetujuan, keterbatasan pendanaan, keterbatasan infrastruktur, leterbatasan akses pasar ekspor, kurangnya standar penanganan dan pemanfaatan metode yang berbasis data.

Untuk selanjutnya tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Triwulan selanjutnya sebagai berikut:

- Tindak lanjut terkait produksi perikanan budidaya mencakup beberapa langkah strategis. Pertama, penting untuk menetapkan zonasi rinci pemanfaatan ruang laut dengan memperhitungkan berbagai kegiatan budidaya dan kepentingan lainnya, seperti transportasi nelayan dan kegiatan wisata. Selanjutnya, diperlukan percepatan dalam penyempurnaan KBLI untuk memasukkan klausul sektor perikanan dan produk biostimulan berbahan baku rumput laut. Evaluasi terkait kriteria penerima manfaat insentif fiskal juga harus dilakukan secara menyeluruh, dengan sosialisasi yang kuat bersama Kementerian/Lembaga terkait. Pilot project dengan penguatan adopsi teknologi mekanisasi juga perlu dikembangkan untuk mendukung petani tradisional.

- Tindak lanjut terkait produksi perikanan tangkap mencakup mendorong alur pelaksanaan pengkajian stok sumber daya ikan dengan MoU antara Kemenko Marves, BRIN, dan akademisi. Ini bertujuan untuk memastikan pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan lingkungan.
- Sementara itu, dalam tindak lanjut terkait ekspor perikanan, fokusnya pada peninjauan kebijakan dan regulasi terkait transportasi, pelabuhan laut, dan infrastruktur. Analisis rute perdagangan internasional dan fasilitas Unit Pengolahan Ikan (UPI) juga penting untuk memastikan kelancaran dan efisiensi dalam ekspor produk perikanan. Diperlukan juga analisis data impor untuk produk dan pasar potensial, serta peningkatan koordinasi dengan grup bisnis dan importir di pasar target. Langkah-langkah ini akan membantu meningkatkan daya saing ekspor perikanan Indonesia dan membuka peluang baru di pasar global.

2. Indikator Kinerja 2 adalah **"Indeks Kesehatan Laut Indonesia"**

Indikator ini menggambarkan Capaian Indeks Kesehatan Laut Indonesia TA 2024. Capaian ini ditargetkan persentasenya dicapai pada TW IV TA 2024 dengan target capaian 76. Capaian ini berasal dari kegiatan Pengelolaan Jasa Kelautan dan Pengukuran Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI).

IKLI dirancang untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kondisi kesehatan laut Indonesia dan memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan kebijakan yang berkelanjutan. Sejak pertama kali diperkenalkan pada tahun 2020, menggunakan data tahun 2019 dan sebelumnya, IKLI telah melalui empat siklus perhitungan hingga tahun 2023, yang menggunakan data tahun 2022 dan sebelumnya. Di tingkat Kemenko Marves, IKLI tidak hanya berfungsi sebagai salah satu indikator kinerja utama, tetapi juga telah diperkenalkan dan diakui baik di tingkat nasional maupun internasional.

Dalam setiap triwulan, laporan progres yang mendukung sepuluh variabel tujuan ini disusun dan dianalisis untuk mengidentifikasi kemajuan yang telah dicapai serta tantangan yang perlu diatasi. Pengukuran yang terus menerus dan pembaruan data yang dilakukan secara berkala memberikan landasan yang kuat untuk pengambilan keputusan berbasis bukti, serta membantu dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat guna dan efisien.

Berikut merupakan progress atau capaian yang dilakukan pada Triwulan I:

- Hasil Skor IKLI 2023
Hasil estimasi skor Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) tahun 2023 menunjukkan perbaikan dalam kondisi kesehatan laut Indonesia dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Skor IKLI 2023 mencapai 76,37, meningkat dari 73,44 di tahun 2022 dan 73,16 di tahun 2020. Meskipun ada peningkatan yang signifikan, kondisi laut

Indonesia masih belum sepenuhnya pulih dari guncangan yang terjadi pada tahun 2021, termasuk dampak pandemi COVID-19 yang mempengaruhi indikator kesehatan laut.

Berikut merupakan perbandingan nilai IKLI dengan OHI

Tahun	IKLI	OHI
2022	73.44	69.33
2023	76.37	73

IKLI merupakan indikator kumulatif yang dihitung berdasarkan 10 tujuan dan 38 variabel, serta menggunakan beberapa indeks lain seperti NTN dan IKAL. Hal ini menjadikan IKLI sebagai indikator yang komprehensif dan tidak bertentangan dengan indikator pembangunan lainnya yang telah digunakan. Skor IKLI 2023 yang masih bersifat statis mengasumsikan bahwa tidak ada ketergantungan antara tujuan dan variabel, meskipun kenyataannya setiap tujuan dan variabel saling mempengaruhi.

Untuk masa depan, pengembangan model dinamis IKLI sangat diperlukan. Model ini diharapkan dapat dianalisis sebagai suatu proses ilmiah di tingkat peneliti, dosen, dan mahasiswa pascasarjana. Analisis yang lebih komprehensif seperti sensitivitas atau elastisitas perubahan suatu tujuan terhadap tujuan lainnya akan lebih dimungkinkan dengan model dinamis ini. Sementara itu, model statis yang lebih mudah dan cepat dianalisis tetap dapat dilakukan dan dikoordinasikan oleh Kemenko Marves.

Selain itu, diperlukan peninjauan kembali terhadap beberapa variabel dan indikator yang digunakan agar IKLI dapat lebih merepresentasikan kondisi riil pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Indonesia. IKLI juga dapat digunakan untuk menilai kinerja pembangunan sektor tertentu seperti perikanan, pariwisata, perhubungan laut, konservasi laut, dan sektor ekonomi yang terkait dengan sumber daya kelautan. Di tingkat nasional, peran lembaga dalam menyediakan data yang akurat sangat dibutuhkan, dan jika estimasi IKLI dilakukan di tingkat daerah, disarankan agar Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Kelautan dan Perikanan provinsi bertanggung jawab dalam hal ini.

- Pertemuan Our Ocean Conference ke-9
 - Terkait dengan komitmen OOC, Indonesia telah menyampaikan 7 (tujuh) komitmen baru, yaitu: to designate 200,000 hectares of new marine protected areas (MPAs) in 2024; to increase from 2023 baseline 10% (on average) the management effectiveness score of existing 17,8 million hectares MPAs; to continue "Love the Ocean Month/Bulan Cinta Laut" Program; to implement

seagrass blue carbon rapid assessment in 20 MPAs, initiate the Blue Carbon Network and Database, and formulate policies and guideline in blue carbon governance; to designate 30 Marine Tourism Villages in Indonesia; to complete the development of 5 integrated Marine Spatial Planning (MSP), and to establish Sustainable Financing Instruments for MPA in Indonesia.

- Marine Protected Areas (MPAs) yang sudah dibentuk tidak hanya dikelola di dalamnya, tapi diperlukan juga perlindungan terhadap MPA tersebut. Well protected area akan memberikan dampak signifikan terhadap stok ikan dan kesejahteraan nelayan. Diperlukan aksi yang konkrit dan nyata dari seluruh negara dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan MPA karena sampai saat ini belum terlihat dampak dari MPA tersebut terhadap kesehatan laut global.
- Sustainable Blue Economies perlu diwujudkan melalui perencanaan, pengelolaan, dan perhitungan nilai ekonomi dan sosial sumber daya kelautan dengan tepat. Panel membahas bagaimana membangun ekonomi biru yang berkelanjutan yang membutuhkan perencanaan yang tepat, sebagai bagian integral dari sumber kehidupan (mata pencaharian), kesehatan, kesejahteraan dan ekonomi, serta local wisdom masyarakat sekitar laut. Diperlukan kolaborasi antara peraturan, dukungan dana, teknologi, science, traditional knowledge, human resources, stakeholder empowerment, dan partnership. Sehingga concerted efforts tersebut dapat mendukung global economy.

Dalam proses mencapai capaian pada Triwulan I terdapat kendala yang dihadapi yaitu berkaitan dengan belum optimalnya data dan model dalam evaluasi kesehatan laut sehingga perlu dipertajam dan dilakukan sosialisasi lebih lanjut dengan cakupan lebih spesifik, keterbatasan kolaborasi dan implementasi komitmen, keterbatasan sumber daya dan infrastruktur dan adanya tantangan pada cakupan Internasional dan Trans-Boundary.

Sehingga perlu dilakukan tindak lanjut sebagai berikut:

- Perlu adanya pengembangan model dinamis untuk analisis yang lebih komperhensif
- Perlu dilakukan penajaman dalam peninjauan terhadap variabel dan indikator yang digunakan
- Perlu adanya sosialisasi lebih lanjut dengan cakupan lebih spesifik

3.1.2 Sasaran Program 2 (SP.2)

Terwujudnya Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan Kebijakan di Bidang Sumber Daya Maritim

3. Indikator Kinerja 3 adalah **“Persentase Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim yang ditindaklanjuti”**

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian Rekomendasi Kebijakan Bidang Sumber Daya Maritim Yang Ditindaklanjuti. Definisi ditindaklanjuti disini adalah rancangan kebijakan tersebut yang merupakan keluaran dari Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah ditindaklanjuti secara internal pada Lingkup Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi dan atau pada lingkup K/L/Instansi yang terkait. Berikut adalah penjelasan capaian output antara pada progress penyusunan rancangan kebijakan Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim pada Triwulan I yang daftarnya disesuaikan pada PK Level Deputi yang telah ditetapkan:

a) Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Perhitungan Indeks Kesehatan Laut Indonesia adalah Policy Memo Kebijakan terkait Perhitungan Indeks Kelautan Indonesia (IKLI).

- Laut memiliki peran yang sangat signifikan bagi ekonomi global dan Indonesia. Menyediakan lapangan pekerjaan untuk lebih dari 350 juta orang di seluruh dunia dan berkontribusi sekitar 60% terhadap ekonomi dunia. Bagi Indonesia, dengan 70% wilayahnya adalah laut, sumber daya laut sangat penting untuk pembangunan ekonomi dan aktivitas masyarakat.
- Inisiatif pemerintah dalam rangka menjaga, mempertahankan, dan bahkan meningkatkan kondisi kesehatan laut Indonesia, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves) melalui kerja sama dengan berbagai mitra pembangunan telah mengembangkan Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) sebagai suatu alat ukur dan indikator pemantauan.
- IKLI sudah mulai diterima ditingkat provinsi, khususnya di DKI Jakarta dan Bali serta direncanakan digunakan di NTT dan NTB. Secara ilmiah, IKLI parsial sudah diteliti di berbagai universitas, khususnya di IPB-University, Universitas Sam Ratulangi, dan Universitas Pattimura.
- Estimasi skor IKLI 2023 mencapai 76.37, meningkat dari 73.44 pada 2022, menunjukkan perbaikan kesehatan laut. Namun, penurunan skor pada 2022 akibat pandemi Covid-19 menunjukkan bahwa kesehatan laut Indonesia cukup sensitif terhadap guncangan eksternal.
- Berikut merupakan perbandingan nilai IKLI dengan OHI

Tahun	IKLI	OHI
2022	73.44	69.33
2023	76.37	73

Berikut merupakan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan pada Triwulan I untuk mendukung ketercapaian nilai IKLI TA 2024:

- Melakukan update data nilai IKLI;
- Telah dikeluarkannya buku penilaian IKLI TA 2023;
- Telah dilakukan rapat pembahasan tata kelola reklamasi keterlanjuran yang bertujuan untuk membahas tata kelola reklamasi keterlanjuran dan menemukan solusi atas kendala yang dihadapi oleh Pemerintah.

Dari ketercapaian nilai IKLI tersebut terdapat beberapa faktor pendukung sebagai berikut:

- Telah dilakukan kerjasama Multi-sektor yang mana Pemerintah bekerja sama dengan berbagai mitra pembangunan, termasuk kementerian, universitas, dan LSM, menunjukkan sinergi lintas sektor yang efektif dalam memantau dan meningkatkan kesehatan laut.
- Adaptasi OHI ke dalam konteks Indonesia dan penggunaan IKLI sebagai indikator kinerja nasional dan internasional memperkuat upaya monitoring kesehatan laut.
- Terdapat dukungan institusi akademisi dan penelitian dalam penilaian IKLI.
- Peningkatan skor IKLI dari tahun ke tahun menunjukkan efektifitas kebijakan dan upaya yang telah dilakukan.

Dalam pelaksanaan dan ketercapaian pada Triwulan I didukung oleh kerjasama yang baik dari pada K/L seperti KKP, Yayasan Konservasi Indonesia, dan para akademisi yang turut serta mendukung ketercapaian kegiatan.

Terdapat beberapa kendala pada penilaian nilai IKLI sebagai berikut:

- Ketergantungan pada data yang disediakan oleh berbagai lembaga dan kementerian bisa menjadi kendala jika data yang diperoleh tidak akurat atau kurang lengkap.
- Penggunaan metode statis dalam perhitungan IKLI tidak mencerminkan saling ketergantungan antara tujuan dan variabel, sehingga tidak menggambarkan kondisi yang dinamis dan kompleks dari ekosistem laut.
- Pandemi Covid-19 menyebabkan penurunan skor IKLI, menunjukkan bahwa kesehatan laut Indonesia sangat sensitif terhadap guncangan baik dari sektor kelautan maupun non-kelautan.
- IKLI baru diterima di beberapa provinsi seperti DKI Jakarta dan Bali, sedangkan penerapan di wilayah lain seperti NTT dan NTB masih direncanakan, menunjukkan penerimaan yang masih terbatas.

Untuk selanjutnya akan ditindaklanjuti dari dalam rancangan kebijakan nilai Indeks Kesehatan Laut Indonesia (IKLI) pada Triwulan II sebagai berikut:

- Kemenko Marves juga merencanakan kegiatan sosialisasi ke Pemerintah Daerah Provinsi dengan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri. Serta Pemangku Kepentingan (stakeholder terkait): Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Dalam Negeri, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Konservasi Indonesia, Perguruan Tinggi.
- Memperkuat mekanisme pengumpulan dan validasi data dari berbagai lembaga untuk memastikan data yang digunakan dalam perhitungan IKLI akurat dan lengkap.
- Mengembangkan metode dinamis untuk estimasi IKLI guna memperhitungkan saling ketergantungan antara tujuan dan variabel, memberikan analisis yang lebih komprehensif dan realistis.
- Demikian juga, estimasi IKLI parsial perlu dilaksanakan di lokasi spesifik, khususnya di tingkat Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP), wilayah laut (seascape) dan Kawasan Konservasi Perairan (KPP).

b) Rancangan Kebijakan Tata Kelola dan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap

Capaian output antara pada penyusunan Policy Memo Rancangan Kebijakan Tata Kelola dan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap.

Berikut merupakan analisa terkait rancangan kebijakan Tata Kelola Pengembangan SDM Perikanan Tangkap:

- Indonesia memiliki potensi sumber daya maritim yang besar, dengan potensi lestari sumber daya ikan sebesar 12,54 juta ton per tahun dan nilai ekonomi mencapai USD 20 miliar per tahun. Namun, pemanfaatan yang diizinkan hanya sekitar 10 juta ton per tahun (80% dari total potensi). Pada tahun 2022, produksi perikanan tangkap mencapai 7,9 juta ton, menempatkan Indonesia sebagai produsen perikanan laut terbesar kedua di dunia, tetapi hanya peringkat kedelapan berdasarkan nilai ekonomi.
- Produksi besar tidak sebanding dengan kesejahteraan nelayan dan awak kapal perikanan. Pendapatan yang rendah dan ketidakadilan dalam sistem perekrutan dan pengupahan menjadi masalah utama. Banyak AKP bekerja tanpa perlindungan hukum penuh, meskipun regulasi yang ada cukup banyak dan kompleks. Masalah utama adalah kurangnya koordinasi dan sinkronisasi antar instansi terkait, menyebabkan regulasi yang ada tidak saling mendukung.

- Indeks harga yang diterima sektor perikanan menurun, sementara indeks harga yang dibayar meningkat. Ini mencerminkan bahwa pengeluaran nelayan lebih besar dari pendapatan, sehingga kondisi ekonomi mereka belum sejahtera. Jika hal ini dibiarkan, jumlah nelayan akan terus berkurang, mengancam keberlanjutan sektor perikanan tangkap.
- Proses rekrutmen AKP seringkali tidak transparan dan tidak sesuai dengan kebutuhan sektor perikanan. Ada tumpang tindih regulasi antara Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub), yang menyebabkan ketidakjelasan dalam proses perekrutan dan penempatan AKP. Pemerintah perlu memperbaiki tata kelola ini, memastikan adanya pengawasan dari proses rekrutmen hingga pemulangan AKP migran.

Berikut merupakan fokus permasalahan sebagai berikut:

- Banyaknya regulasi yang menyebabkan tumpang tindih dan tidak dilakukan koordinasi antar instansi terkait.
- Proses rekrutmen perlu diperbaiki agar lebih transparan dan sesuai dengan kebutuhan sektor perikanan.
- Perlu ada program yang lebih fokus pada peningkatan kesejahteraan nelayan dan AKP, termasuk peningkatan kompetensi dan perlindungan hukum. Indeks harga yang diterima dan dibayar juga perlu ditinjau kembali untuk memastikan nelayan mendapatkan penghasilan yang layak.
- Program pelatihan dan sertifikasi kompetensi bagi AKP perlu ditingkatkan.

Dari permasalahan tersebut maka Dibutuhkan suatu tata kelola perikanan tangkap yang terintegrasi dan menyeluruh agar SDM perikanan tangkap dapat mencapai kesejahteraannya.

Tahapan yang dilakukann apda Triwulan I ini yaitu agenda setting yang merupakan proses menyusun draft rekomendasi kebijakan yang akan dilakukan. Rekomendasi kebijakan yang diusulkan yaitu pembentukan Tim Optimalisasi Kompetensi dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan yang terdiri dari semua instansi terkait dan pembentukan rencana kerja sama dengan Asosiasi.

Berikut merupakan progres yang telah dilakukan untuk mencapai agenda setting pada Triwulan I sebagai berikut:

- Penyusunan rencana kerja sama dengan EJF yang dilaksanakan pada 18 Maret 2024.
- Penyusunan draft SK Tim dengan mengumpulkan data dan informasi secara menyeluruh untuk membentuk suatu rekomendasi kebijakan yang tepat.

- Ujicoba Inspeksi Bersama Kompetensi dan Pelindungan Awak Kapal Perikanan yang dilakukan di wilayah Pelabuhan Benoa, Bali pada tanggal 6 Maret 2024. Uji coba inspeksi dilakukan ke PPN Pengembangan dan 5 perusahaan (PT Primo Indo, PT Intimas Surya, PT Bandar Nelayan, PT Golden Tuna, dan PT Lianinti Abadi).

Faktor pendukung untuk ketercapaian hingga Triwulan I sebagai berikut:

- Usulan pembentukan Tim yang melibatkan berbagai instansi terkait dapat meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi regulasi, serta pengembangan SDM perikanan tangkap.
- Keterlibatan berbagai pemangku kepentingan seperti Kemenko PMK, Kemenko Perekonomian, Bappenas, Kementerian Luar Negeri, KKP, Kementerian Perhubungan, Kementerian Ketenagakerjaan, dan lain-lain menunjukkan potensi untuk sinergi yang lebih baik dalam pengelolaan sektor perikanan.
- Terdapat 11 Undang-Undang, 6 Peraturan Pemerintah, 3 Peraturan Presiden, dan 10 Peraturan Menteri yang mengatur sektor perikanan. Keberadaan regulasi ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengatur dan melindungi sektor perikanan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

- Pasokan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi untuk kapal perikanan dengan perizinan daerah (<12 mil) selama 2023 ditemukan menjadi kendala terbesar nelayan dalam menangkap ikan.
- Kuota yang diberikan tidak dapat memenuhi kebutuhan nelayan yang ada. Oleh karena itu, diperlukan koordinasi yang lebih mendalam dalam memenuhi kuota BBM bersubsidi untuk nelayan dan mencari energi alternatif lain yang murah dan ramah lingkungan.

Selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Triwulan berikutnya sebagai berikut:

- Kementerian Kelautan dan Perikanan agar dapat melakukan pembangunan infrastruktur perikanan tangkap dengan memastikan prinsip-prinsip keberlanjutan;
- Kementerian PPN/Bappenas agar dapat memastikan perencanaan dan penganggaran dialokasikan dengan baik untuk pembangunan infrastruktur perikanan tangkap yang berkelanjutan.

- Kementerian Keuangan untuk dapat mengevaluasi bagi hasil PNBP perikanan tangkap sehingga dapat dibangun infrastruktur perikanan tangkap yang berkelanjutan secara lebih tepat sasaran;
- Pemerintah daerah agar dapat bersinergi dalam pembangunan infrastruktur perikanan tangkap yang berkelanjutan di daerahnya masing-masing.

c) Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi merupakan policy memo terkait Rancangan Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi.

Berikut merupakan analisa dari capaian pada Triwulan I yaitu budidaya rumput laut memiliki peran strategis pada upaya pengembangan sektor maritim Indonesia. Sebagai salah satu komoditas unggulan Nasional, rumput laut tidak hanya memiliki potensi sebagai sumber pangan dan farmasi, tetapi seiring dengan perkembangan waktu, saat ini rumput laut juga digunakan sebagai bahan baku untuk industri biostimulan, bioplastik, hingga biofuel. Di Tingkat global, inovasi – inovasi hasil diversifikasi produk turunan rumput laut masih terbuka luas dengan potensi pasar yang sangat besar. Oleh karena itu, upaya pengembangan industry rumput laut dalam negeri perlu menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk meningkatkan kontribusi sektor maritim terhadap ekonomi nasional.

Bapak Presiden pada rapat terbatas internal kabinet tanggal 23 Juni 2023 telah memberikan arahan untuk menginisiasi berbagai program dan kebijakan untuk mempercepat hilirisasi industri rumput laut nasional, diantaranya pemetaan wilayah laut yang potensial untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya, pengembangan pilot project kawasan percontohan budidaya rumput laut, pengembangan ekosistem besar hulu hilir dengan tetap memperhatikan akses pemasaran, penyusunan roadmap pengembangan industry rumput laut nasional beserta turunannya, serta pengembangan riset dan inovasi.

Berikut merupakan fokus pada Tahun 2024:

- Menetapkan zonasi pemanfaatan ruang laut dengan mempertimbangkan pembagian peruntukan antara kegiatan budidaya tradisional, corporate farming, serta alur transportasi nelayan.
- Mempercepat proses penyempurnaan KBLI untuk memasukkan klausul sektor perikanan dan produk biostimulan berbahan baku rumput laut tanpa menunggu review berkala.
- Melakukan evaluasi terkait kriteria penerima manfaat insentif fiskal.

- Melakukan sosialisasi bersama Kementerian/Lembaga, terkait insentif fiskal yang sudah disediakan oleh pemerintah.
- Melakukan kajian secara cepat terkait usulan pengenaan bea keluar untuk ekspor produk raw material.
- Menetapkan usulan quick win hilirisasi rumput laut. Adapun produk yang diajukan adalah biostimulan.
- Mengembangkan pilot project dengan tema adopsi teknologi mekanisasi untuk petani tradisional.

Berikut merupakan progres yang telah dilakukan pada Triwulan I:

- Telah melaksanakan monitoring dan evaluasi bersama K/L terkait dan hasilnya telah disampaikan kepada Bapak Presiden melalui Sekretariat Kabinet.
- Telah dilakukan fasilitasi investasi sekaligus pilot project budidaya rumput laut terintegrasi hulu – hilir berskala besar (area luasan hingga 100 Ha) dengan konsep corporate farming di Provinsi NTB.
- Telah dikakukan Kegiatan Showcase Pilot Project Budidaya Rumput Laut Skala Besar Terintegrasi Hulu – Hilir di Teluk Ekas, Kabupaten Lombok Timur, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- Telah dilakukan rapat koordinasi persiapan launching International Tropical Seaweed Center yang bertepatan dengan acara World Water Forum 2024.
- Telah dilakukan kunjungan lapangan pemanfaatan rumput laut sebagai biostimulant untuk produk pertanian, tujuan kunjungan lapangan ini yaitu untuk memperoleh informasi terhadap pemanfaatan rumput laut sebagai biostimulant serta melihat kesiapan LSSF (Large Scale Seaweed Farming) untuk kunjungan kerja presiden RI.
- Dilakukan penyampaian Nota Dinas kepada Deputi Bidang Koordinasi Pengelolaan Lingkungan dan Kehutanan sebagai side event dari WWF yaitu Launching Tropical Seaweed Center Forum.

Dalam ketercapaian pada Triwulan I didukung oleh:

- Adanya koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait seperti KKP, Kementerian Perindustrian, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Neger, Kementerian BUMN dan BRIN.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dihadapi pada Triwulan I yaitu:

- Pemanfaatan potensi ruang laut untuk kegiatan budidaya belum optimal.
- Produktivitas pembudidaya tradisional sangat terbatas.

- Banyak inovasi produk turunan rumput laut yang belum masuk ke industry untuk produksi skala besar.

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya yaitu:

- Perlu adanya kategorisasi dan standarisasi sendiri untuk mengatur biostimulant sebagai bio-fertilizer secara utuh.
- Perlu adanya kolaborasi multi stakeholder untuk pengembangan industri rumput laut nasional.
- Perlu adanya inovasi teknologi yang tepat dan efisien mulai dari proses budidaya hingga pengolahan. Utamanya, area dan produktivitas eksisting harus ditingkatkan dan biaya untuk budidaya dan pengolahan rumput laut harus dapat diturunkan.

d) Rancangan Kebijakan Penguatan Pemasaran Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Penguatan Pemasaran Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan policy memo Kebijakan Penguatan Pemasaran Ekspor Produk Kelautan dan Perikanan.

Komoditas utama ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia adalah udang, tuna, cakalang, tongkol (TTC), dan rumput laut. Udang menyumbang sekitar 40% dari total nilai ekspor, TTC sekitar 15%, dan rumput laut menunjukkan pertumbuhan ekspor yang tinggi. Sementara pasar utama ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia adalah Amerika Serikat (25% pangsa pasar), Jepang (15%), dan Tiongkok (10%). Tiongkok merupakan pasar dengan pertumbuhan ekspor yang tinggi.

Selain komoditas pangan, Indonesia juga diberkahi dengan kekayaan alam yang luar biasa, termasuk keanekaragaman hayati ikan hias yang tinggi. Lebih dari 2.500 spesies ikan hias mendiami perairan Indonesia, menjadikannya salah satu negara dengan potensi ekspor ikan hias terbesar di dunia.

Tren memelihara ikan hias di rumah yang semakin populer, membuat permintaan ikan hias di pasar global terus meningkat. Hal ini membuka peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pemain utama dalam perdagangan ikan hias global. Pada tahun 2022, Indonesia berhasil mencatatkan nilai ekspor ikan hias senilai USD 34,5 juta. Capaian ini menunjukkan potensi besar industri ikan hias Indonesia. Negara tujuan utama ekspor ikan hias Indonesia adalah Jepang, Amerika Serikat, Tiongkok, dan Uni Eropa. Jenis ikan hias yang paling diminati di pasar global antara lain cupang, guppy, discus, dan arwana.

Dalam pengawalan Rancangan Kebijakan Pemenuhan Sarana dan Prasarana Rantai Pasok Dingin Produk Kelautan dan Perikanan terdapat 2 fokus yang akan

didorong pada TA 2023 yaitu Dukungan Koordinasi Penetapan Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali menjadi salah satu pintu gerbang (hub logistik udara) ekspor produk-produk perikanan dan Monitoring dan Evaluasi Fasilitas PLTS Atap Pengadaan Kementerian ESDM TA 2020 dan Cold Storage pada Sentra Produksi Perikanan Pengadaan KKP TA 2015- 2022 di 17 Lokasi.

Berikut merupakan progress yang telah dilakukan pada Triwulan berjalan yaitu:

- Telah dilakukan Rapat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mengenai re Persiapan Tripartite Meeting TCTP
- Telah dilakukan Kegiatan Rakor Prospera terkait pengembangan hub bisnis
- Telah dilakukan Kunjungan Lapangan Pengembangan Hub Bisnis Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan
- Telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Hub Bisnis Ekspor Produk KP Indonesia di Timur Tengah

Berikut merupakan faktor pendukung pada Triwulan berjalan yaitu:

- Dukungan dan komitmen bersama dari pemangku kepentingan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, Pemerintah Daerah, serta Pelaku Usaha.

Berikut merupakan kendala yang dihadapi pada Triwulan berjalan yaitu:

- Tuduhan antidumping dan tuduhan CVD margin oleh otoritas Amerika Serikat terhadap ekspor udang beku dari Indonesia pada 14 November 2023;
- persaingan global yang ketat dalam hal ini negara seperti Vietnam, Thailand, dan India memiliki keunggulan dalam biaya, infrastruktur, dan teknologi.
- Persyaratan dan regulasi ketat di negara tujuan ekspor, seperti standar mutu, keamanan pangan, dan keberlanjutan, perlu dipenuhi oleh produk Indonesia disamping kurangnya infrastruktur, akses informasi dan pasar, dan tenaga kerja terampil.

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan II yaitu:

- Meningkatkan kualitas dan nilai tambah produk kelautan dan perikanan melalui program-program seperti Good Aquaculture Practices (GAP) dan Good Manufacturing Practices (GMP).
- Memperkuat promosi dan pemasaran produk kelautan dan perikanan Indonesia di luar negeri melalui pameran dagang, business matching, dan promosi online.
- Membuka akses pasar baru melalui perundingan perdagangan internasional dan kerjasama bilateral.

- Meningkatkan daya saing produk kelautan dan perikanan Indonesia melalui peningkatan infrastruktur, pengembangan teknologi, dan pelatihan tenaga kerja.

e) Rancangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional adalah Policy Memo Kebijakan Percepatan Pembangunan Industri Pergaraman Nasional.

Terdapat dua tantangan utama yang menjadi perhatian dalam rangka implementasi kebijakan percepatan pembangunan industri pergaraman nasional melalui Perpres 126 tahun 2022 tentang Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional (Perpres P3N):

- Adopsi teknologi dalam produksi garam yang masih belum masif. Kedua, beberapa industri pengolah masih belum memiliki kesesuaian standar BPOM.
- Tantangan ini jika tidak segera diselesaikan dapat berpengaruh negatif terhadap upaya pemenuhan target Perpres P3N. Dalam Pasal 2 Perpres P3N disebutkan bahwa pemenuhan garam nasional melalui produksi dalam negeri paling lambat tahun 2024 kecuali garam untuk industri kimia dan chlor alkali.

Rencana Aksi Perpres P3N dimulai sejak tahun 2022 dan akan berakhir di tahun 2024. Dalam rencana aksi Perpres P3N disebutkan lima agenda agenda pergaraman nasional dari faktor pra produksi, produksi, pasca produksi, pengolahan dan pemasaran. Dalam rangka mengimplementasikan rencana aksi tersebut, pemerintah melalui KKP dan Kemenko Marves telah menetapkan serangkaian peraturan menteri dan keputusan menteri. Sebagai wujud penguatan implementasi, Kemenko Marves juga telah membuat kelompok kerja melalui Kepmenko Marves 156/DII tahun 2023 tentang Tim Pelaksana Teknis Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Renaksi percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional untuk memantau progres pelaksanaan rencana aksi tersebut.

Berikut merupakan kegiatan yang telah dilakukan dalam implementasi kebijakan pada Triwulan I sebagai berikut:

- Rapat Koordinasi Capaian Pelaksanaan Percepatan Pembangunan Pergaraman Nasional tahun 2023 dan Rencana Kerja tahun 2024
- Rapat Koordinasi Pembahasan Kebutuhan Garam Farmasi Melalui Hasil Produksi Garam Dalam Negeri
- Launching Kajian Fortifikasi Pangan Berskala Besar (FPBB) di Indonesia dan SK Forum Koordinasi Fortifikasi Pangan Nasional

- FGD Persiapan Sektor Industri Farmasi Dan Kosmetik Dalam Menyerap Bahan Baku Garam Farmasi Yang Diproduksi Dalam Negeri
- Rapat koordinasi Koordinasi capaian pelaksanaan percepatan pembangunan pergaraman nasional tahun 2023 dan rencana kerja tahun 2024

Dalam ketercapaian pada Triwulan berjalan berikut merupakan faktor pendukung yaitu:

- MoU antara produsen lokal garam farmasi dan kosmetik dengan industri pengguna;
- Perpres P3N pemerintah telah berhasil mendorong kestabilan harga di tingkat petambak garam;
- Kemenko Marves melibatkan Kemenko Bidang Perekonomian, Sekretariat Kabinet, KKP, Kementerian Perindustrian, dan BRIN dalam tim kerja Kepmenko Marves 156/DII tahun 2023. Pada level pelaksana teknis terdapat sejumlah K/L dan OPD lokasi SEGAR yang dilibatkan dalam implementasi kebijakan.

Berikut merupakan kendala yang dihadapi pada Triwulan berjalan sebagai berikut:

- Saat ini adopsi teknologi dalam produksi garam yang masih belum masif;
- beberapa industri pengolahan masih belum memiliki kesesuaian standar BPOM;
- adanya pembatasan ekspor pada perusahaan.

Dari kendala tersebut selanjutnya akan dilakukan tindak lanjut pada Triwulan II yaitu:

- perlu adanya evaluasi rencana kerja pelaksanaan rencana aksi Perpres P3N tahun 2024 akan fokus pada peningkatan kuantitas dan kualitas produksi;
- Rapat Koordinasi Tim Kerja level eselon 1 yang dipimpin Bapak Deputi dan hasilnya dapat dibahas pada tingkat level Menteri;
- monitoring progres pengusulan kembali alokasi impor masing-masing perusahaan pengguna garam farmasi yang nantinya akan diputuskan melalui Kemenko Bidang Perekonomian;
- Kemenko Marves akan mendorong PT Unichem Candi Indonesia, PT Pecatu Indah Pasha, dan PT Tudung Karya Daya Farmasi untuk segera memproses sertifikasi CPOB dari BPOM.

f) Rancangan Kebijakan Proyek Prioritas Strategis Nasional

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Proyek Prioritas Strategis Nasional adalah policy memo terkait Rancangan Kebijakan Proyek Prioritas Strategis Nasional.

Sektor Kelautan dan Perikanan melibatkan banyak pemangku kepentingan, sehingga perlu dikoordinasikan serta disinkronisasikan program dan kegiatan yang ada di masing-masing lembaga, sehingga target yang telah ditetapkan bisa terwujud. Banyak isu yang harus diselesaikan antara lain: pendanaan, kelembagaan, pembebasan lahan, dan investasi.

Pemerintah telah menetapkan Major Project Revitalisasi pertambakan udang dan Bandeng (supply side policy) dengan lokus utama di provinsi Lampung, Jawa, Sulawesi Selatan dan NTB didalam RPJMN 2020 - 2024. Terdapat 5 kegiatan utama, salah satunya yakni Revitalisasi saluran irigasi. Pada tahun 2023, Kemenko Marves telah melakukan pengendalian dan sinkronisasi kebijakan/program terhadap Kementerian PUPR dan KKP. Pada tahun 2023, KKP telah melaksanakan penyusunan DED untuk kawasan pertambakan di provinsi Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Sedangkan pengerjaan fisik akan dilakukan oleh PUPR di tahun 2024.

Fokus Permasalahan yang ingin diselesaikan:

- Terkait Revitalisasi Tambak Udang dan Pembangunan Pelabuhan Perikanan Terintegrasi dengan Pasar Ikan Bertaraf Internasional.
- Terkait pembangunan pelabuhan perikanan terintegrasi, permasalahan yang ingin diselesaikan adalah terkait proses integrasi pengelolaan, fasilitas pelabuhan perikanan, dan mewujudkan pasar ikan bertaraf internasional.

Berikut merupakan Progress atau capaian yang telah dilakukan pada Triwulan berjalan sebagai berikut:

- Telah dilakukan Showcase Piloting Budidaya Rumput Laut Skala Besar;
- Finalisasi pembentukan tim kerja optimalisasi kompetensi dan perlindungan awak kapal perikanan;
- Koordinasi Kebijakan Nasional Pemanfaatan Biostimulan Rumput Laut pada 18 Maret;
- Rapat Koordinasi Maritime Investment Policy in Indonesia Based on Blue Economy;
- Telah dilakukan dengan pendanaan IDB (Pengembangan dan Kejawanan), JICA (Natuna, Likupang, Merauke, Lampulo, Pekalongan dan Bagansiapi-api);
- Rapat koordinasi Accelerating Government Digitalization in Indonesia.

Berikut merupakan kendala yang dihadapi pada Triwulan berjalan sebagai berikut:

- Kendala atas kebijakan ini adalah terkait koordinasi dan sinergi pendanaan, keterlibatan lintas sektor yang kurang sinkron, dan kebutuhan koordinasi yang intensif.

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilaksanakan pada Trwiulan II:

- terkait pelaksanaan integrasi pelabuhan perikanan dan fishmarket bertaraf international, perlu adanya koordinasi lebih lanjut terkait Koordinasi dan Kunjungan Lapangan pembangunan IFP-IFM Fase-1 (PHLN JICA) dan Pembangunan IFP-IFM Fase-1 (PHLN IsDB);
- terkait revitalisasi kawasan tambak udang dan bandeng Perlu ada justifikasi yang lebih kuat terkait kewajiban/urgensi untuk memasukan sektor perikanan secara khusus poklina kedalam komisi irigasi provinsi.

Faktor Pendukung dari ketercapaian pada Triwulan berjalan sebagai berikut:

- Adanya koordinasi yang baik antara K/L terkait seperti KKP, JICA, Komisi Irigasi Provinsi sehingga dapat tercapai progress pada Triwulan I

g) Rancangan Kebijakan Kelautan Global (Ocean20)

Capaian output antara pada penyusunan Rancangan Kebijakan Kelautan Global (Ocean2) adalah Policy Memo terkait Kebijakan Kelautan Global (Ocean2)).

Brazil secara resmi meluncurkan Oceans 20 (O20) Tahun 2024, yang berfokus pada topik-topik khusus laut yang bertujuan untuk menyelipkan keseluruhan pada agenda G20. Brazil akan mengambil alih kepresidenan bergilir G20, dan akan menjadi yang negara ketiga dalam serangkaian empat negara berturut-turut dari Global Selatan.

Forum Kelautan Global (Ocean 20) pada Tahun 2024 menjadi sebuah keluaran kebijakan yang pada tahun-tahun sebelumnya merupakan isu strategis pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Kebijakan Kelautan Global (Ocean 20) merupakan kebijakan koordinasi dan sinkronisasi diakrenakan kebijakan ini merupakan kebijakan baru dan keberadaan kebijakan ini adalah mengkoordinasikan serta mensinkronisasikan keberlangsungan forum Ocean20 pada forum global G20.

Capaian pada pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan kelautan global (Ocean 20) pada Tahun 2022 adalah Terlaksananya Ocean20 Dialogue, Ocean20 High-level Meeting dan Ocean20 Launching pada Presidensi G20 Indonesia di Bali, pada 14 November 2022, kemudian pada Tahun 2023 adalah Terlaksananya Ocean20 Dialogue pada Presidensi G20 India pada tanggal 21 Mei 2023 dan Terlaksananya Ocean20 Governance Forum pada COP28 Dubai pada 2 Desember 2023.

Fokusan pada Tahun 2024 sebagai berikut:

- Pada Tahun 2024 direncanakan akan mencapai Terbentuknya Ocean20 Engagement Group sebagai salah satu agenda tetap G20 pada Presidensi G20 Brazil, dan tersedianya agenda Ocean20 pada rangkaian kegiatan G20 tahun 2024.

- Forum Kelautan Global (O20) sebagai sebuah forum diskusi berusaha untuk menjadi bagian dari Forum G20 setiap tahunnya sehingga pelaksanaan diskusi tentang kelautan global dapat terus terlaksana dan dapat berdampak pada keberlanjutan ekosistem kelautan.

Dalam pelaksanaan yang dilakukan berikut merupakan progress atau capaian yang telah dilakukan untuk mendukung pada Triwulan I:

- Kemenko Marves telah diundang dalam Inception Meeting of the Oceans 20 Engagement Group of the G20 Brazil oleh Pemerintah Brazil;
- Telah dilakukan rapat pembahasan untuk Ocean 20 menjadi engagement group bersama pemerintah Brazil;
- Rapat Koordinasi dengan Sherpa mengenai persiapan engagement group yang akan dilakukan pada G20 Brazil;
- Saat ini sedang dilaksanakan proyek percontohan budidaya rumput laut berskala besar di Nusa Tenggara Barat, dengan menggunakan mekanisasi dan teknologi untuk mengolah rumput laut menjadi makanan, biofertilizer, bioplastik, dan bahan bakar nabati sebagai bentuk keterlibatan pemerintah Indonesia dalam mendukung Ocean 20.

Dalam pelaksanaan progress atau capaian pada Triwulan I terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

- Kurangnya fokus pada Isu Laut sebelumnya;
- Adanya ancaman perubahan iklim;
- tantangan dalam perlindungan kawasan laut, konsistensi dan perluasan agenda Ocean20 dan koordinasi internasional

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan II:

- Terkait perluasan agenda laut pada forum G20 serta akan dilakukan optimalisasi kolaborasi internasional dan pengembangan pada blue economy.

Dari progress atau capain yang dilakukan terdapat factor yang mendukung ketercapaian tersebut yaitu:

- Koordinasi yang baik antara K/L terkait seperti KKP, Sherpa, WEF, serta Pemerintah Brazil sebagai tuan rumah G20 Brazil 2024.

4. Indikator Kinerja 4 adalah **"Persentase isu-isu Strategis yang Diselesaikan"**

Indikator ini menggambarkan persentase penyelesaian isu-isu strategis yang ditargetkan selesai pada Tahun 2024. Sesuai PK, terdapat 9 Isu Strategis pada Dokumen

Perjanjian Kinerja Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2024. Berikut adalah daftar isu strategis dan kriteria keberhasilannya:

No	Isu Strategis	Kriteria Keberhasilan
1	Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan	Tersedianya Draft dan/atau Dokumen Pendaftaran Kawasan Konservasi Indonesia untuk IUCN-Green List
2	Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional	Tersedianya Laporan Perkembangan IFP-IFM
3	Koordinasi Penangkapan Ikan Terukur	Perkembangan Kebijakan Penangkapan Ikan Terukur
4	Koordinasi Revitalisasi Kasawan Tambak Udang dan Bandeng	Tersedianya Laporan Major Project
5	Koordinasi Kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional	Laporan Pencapaian Peran NBAAP pada Agenda Pembangunan Biru Nasional di dalam RPJMN 2025-2029
6	Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam	Laporan Pelaksanaan Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam
7	Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara	1. Tersedianya usulan kebijakan terkait dengan FPKM 2. Terselenggarakannya pendataan sawit rakyat 3. Tersedianya usulan kebijakan dari pendataan sawit rakyat 4. Tersedianya integrasi sistem melalui digitalisasi terkait sawit di sisi hulu
8	Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia	Tersedianya Dokumen/Laporan Pemantauan dan Evaluasi Mekanisme Penyelenggaraan Pendirian dan/atau Penempatan Bangunan dan Instalasi di Laut
9	Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu - Hilir	Tersedianya Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional

Kriteria keberhasilan tersebut dipecah menjadi target-target sebagai output antara yang dicapai setiap triwulannya. Berikut adalah laporan proses dan capaian sementara dari isu-isu strategis lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2024:

a) Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan

Pada pelaksanaan isu strategis Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan output antara yang telah dilaporkan adalah laporan pelaksanaan Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan.

Indonesia berkomitmen untuk menjadikan 10% wilayah perairan Indonesia menjadi kawasan konservasi perairan. Hingga tahun 2023, Indonesia telah memiliki Kawasan Konservasi Perairan seluas 29,3 juta hektar (9 % dari total luas perairan Indonesia seluas 325 juta hektar). Selain mendukung perluasan Kawasan Konservasi Perairan,

Pemerintah Indonesia juga mendorong peningkatan pengelolaan Kawasan Konservasi di Indonesia untuk mengoptimalkan potensi dan manfaat dari Kawasan Konservasi.

Kewenangan pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia berada di Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Pemerintah Daerah. Sedangkan penilaian pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia saat ini menggunakan 2 metode, yaitu EVIKA (Evaluasi Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi) oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan dan METT (Management Effectiveness Tracking Tools) oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Karena adanya dualisme tersebut, Pemerintah Indonesia berencana untuk menggunakan suatu standarisasi internasional pada penilaian pengelolaan Kawasan Konservasi Indonesia dan standarisasi tersebut ialah Green List yang dikeluarkan oleh International Union for Conservation of Nature (IUCN).

Bukti dukung yang disampaikan dalam progress capaian Koordinasi Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan pada Triwulan I yaitu:

- Progres Adopsi Standarisasi International Union For Conservation of Nature (IUCN) - Green List dalam pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia;
- Rapat Koordinasi Teknis dan Singkronisasi Kebijakan Pengelolaan Konservasi dan Pendayagunaan Pulau-pulau Kecil;
- pemantauan dan evaluasi capaian pengelolaan Kawasan Konservasi Perairan tahun 2023 dengan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, KKP dan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, KLHK.
- pelaksanaan diskusi dan konsultasi dengan NGO Coral Triangle Center selaku NGO yang inisiator standarisasi IUCN-Greenlist di Indonesia; dan
- konsultasi dan diskusi dengan perwakilan (programme officer) IUCN-Greenlist.

Dalam pelaksanaannya, faktor pendukung dalam pencapaian kinerja pelaksanaan penyelenggaraan koordinasi peningkatan efektivitas kawasan konservasi perairan di Indonesia adalah telah ada pilot project kawasan konservasi yang telah menjalani proses pendaftaran standarisasi Greenlist-IUCN, yaitu Kawasan Konservasi Daerah Nusa Penida, Bali oleh Pemda bekerjasama dengan NGO Coral Triangle Center. Selain itu, KKP sangat mendukung rencana adaptasi standarisasi Greenlist IUCN, karena sejalan dan mendukung kebijakan dan program yang sedang dilakukan oleh KKP di bidang perlindungan dan konservasi laut.

Namun di samping itu, ditemukan beberapa hal yang menjadi kendala dalam pelaksanaan kegiatan di TW I antara lain:

- Standarisasi IUCN-Greenlist merupakan hal yang baru di Indonesia, sehingga perlu dilakukan pengenalan dan sosialisasi terkait standarisasi ini kepada K/L serta stakeholder terkait;
- Keterbatasan jumlah aparatur/personil unit Asdep PRLP untuk mengimbangi padatnya jadwal kegiatan rutin Timnas;
- Terdapat K/L pengelola kawasan konservasi perairan yang berpotensi untuk tidak berperan aktif/berpartisipasi dalam implementasi standarisasi Greenlist-IUCN karena perbedaan arah kebijakan dan prioritas.

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada triwulan selanjutnya sebagai berikut:

- Pada Semester I T.A. 2024, Asisten Deputi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir, Kemenko Marves melakukan pembahasan dan konsultasi dengan Kementerian /Lembaga pengelola Kawasan Konservasi Perairan di Indonesia (KKP dan KLHK) terkait rencana adopsi/implementasi standarisasi Greenlist-IUCN;
- Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim perlu menyelenggarakan Rapat Koordinasi dengan Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Laut, KKP dan Direktorat Pengelolaan Kawasan Konservasi, KLHK untuk perumusan Surat Komitmen Pemerintah Indonesia serta penentuan lokasi usulan untuk standarisasi IUCN-Greenlist.
- Pembentukan Tim EAGL (Expert Assesment Grup for the Green List) Indonesia, yang terdiri atas pakar, akademisi dan praktisi. Tim EAGL Indonesia akan diseleksi dan training oleh IUCN.

b) Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi Pelaksanaan Integrasi Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional, output antara yang disampaikan adalah Laporan Koordinasi Pelaksanaan Integrasi Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional.

Pelabuhan perikanan sebagai infrastruktur yang dapat memfasilitasi kegiatan usaha penangkapan ikan dan kegiatan usaha perikanan di hulu (sebagai salah satu unsur pemasok bahan baku ikan) memiliki peran yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan ikan nasional maupun ekspor perikanan Indonesia. Namun, masih terdapat isu pengelolaan pelabuhan perikanan yang perlu diselesaikan seperti fasilitas pelabuhan yang kurang memadai; persyaratan keamanan pangan dan isu lingkungan oleh negara importir; fasilitas dan sistem ketelusuran hasil tangkapan

ikan (fisheries traceability); dan belum tersedianya fasilitas pasar ikan yang memenuhi standar internasional ekspor.

Oleh karena itu, program Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market bertaraf Internasional (IFP-IFM) perlu untuk dilaksanakan. Maksud dari program ini adalah untuk mengintegrasikan pengelolaan, fasilitas pelabuhan perikanan, dan mewujudkan pasar ikan bertaraf internasional. Program IFP-IFM yang sedang dilaksanakan saat ini, pendanaannya didapatkan dari pinjaman luar negeri melalui empat institusi (IsDB, JICA, ADB dan AFD). Proyek IFP-IFM IsDB dilakukan pada lokasi Pengembangan dan Kejawatanan untuk tahap I dan di Tual, Batu, Duyung, Munsang dan Paumako untuk tahap II. Proyek dengan pendanaan JICA dilakukan di Selat Lampa, Likupang, Merauke, Biak, Lampolo, Pekalongan dan Bagansiapiapi. Proyek dengan pendanaan ADB dilaksanakan pada tahap II di Bungus, Ambon, Teluk Awang, Tegalsari, Bolok, Mansapa, dan Waiya Depapre. Proyek pendanaan AFD dilaksanakan pada tahap II di Bitung, Kendari, Belawan dan Cilacap. rnasional untuk menunjang kegiatan usaha perikanan di hulu yang memiliki peran dalam mendukung pemenuhan bahan baku industri pengolahan dalam negeri dan ekspor.

Program IFP-IFM yang sedang dilaksanakan saat ini, pendanaannya didapatkan dari pinjaman luar negeri melalui empat institusi (IsDB, JICA, ADB dan AFD). Proyek IFP-IFM IsDB dilakukan pada lokasi Pengembangan dan Kejawatanan untuk tahap I dan di Tual, Batu, Duyung, Munsang dan Paumako untuk tahap II. Proyek dengan pendanaan JICA dilakukan di Selat Lampa, Likupang, Merauke, Biak, Lampolo, Pekalongan dan Bagansiapiapi. Proyek dengan pendanaan ADB dilaksanakan pada tahap II di Bungus, Ambon, Teluk Awang, Tegalsari, Bolok, Mansapa, dan Waiya Depapre. Proyek pendanaan AFD dilaksanakan pada tahap II di Bitung, Kendari, Belawan dan Cilacap.

Berikut merupakan capaian atau progress yang pada Triwulan I untuk mendukung output capaian sebagai berikut:

- Telah dicapai loan agreement untuk proyek dengan pendanaan AFD (98,67 juta euro), IsDB (100 juta euro) dan ADB (1,49 juta yen);
- Telah dilaksanakan koordinasi dengan DJPT KKP terkait keseluruhan progress program IFP-IFM dan dilakukan pemantauan ke proyek dengan pendanaan JICA di Likupang, Sulawesi Utara;
- Peninjauan Calon Lokasi Integrasi Pelabuhan Perikanan dan Fish Market Bertaraf Internasional (IFP- IFM) di Sulawesi Utara.

Dari capaian tersebut faktor pendukung dalam ketercapaian kinerja pada Triwulan I yaitu adanya kerjasama yang baik oleh pemangku kepentingan seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bappenas, Kemenkeu, Kemen PUPR dan Pemerintah Daerah.

Namun dalam perjalanannya terdapat kendala yang dihadapi yaitu:

- Belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh dan perlu diseleksi kembali lokasi-lokasi yang prioritas untuk dilaksanakan pembangunan;
- Belum dilakukan penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan pasar ikan dan akses jalan; dan
- Proses bisnis perikanan tangkap yang masih dalam skala rendah.

Hal-hal yang perlu ditindaklanjuti oleh Kemenko Marves pada Triwulan II selanjutnya adalah memastikan evaluasi program IFP-IFM yang sedang dilakukan oleh KKP dapat berjalan sesuai harapan, mengawal dan memberikan dukungan koordinasi dalam pelaksanaan program.

c) **Koordinasi Penangkapan Ikan Terukur**

Pada pelaksanaan isu strategis Koordinasi Penangkapan Ikan Terukur, output antara yang telah disampaikan adalah Rancangan Kemitraan Pusat dan Daerah terkait pelabuan pangkalan, TPI, dan kapan penangkapan ikan.

Kondisi perikanan saat ini 35 % berada pada tingkat over exploited dan 54 % berada pada Tingkat fully-exploited. Hal ini menjadi tantangan terkait adanya penurunan stok ikan, mutu yang tidak terjaga dan rantai bisnis yang tidak efisien. Perikanan yang tidak diatur (unregulated) akan cenderung menepatkan upaya penangkapan pada Tingkat yang melebihi Tingkat optimal sehingga over investasi terjadi dan perikanan menjadi tidak efisien secara sosial dan ekonomi.

Kemitraan antara pemerintah pusat dan daerah merupakan elemen penting dalam tata kelola perikanan berkelanjutan karena memungkinkan sinergi dan koordinasi dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan, menyajikan kebijakan yang tepat sasaran, menghindari duplikasi dan pemborosan anggaran, mendorong penggunaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien untuk mencapai tujuan bersama, memanfaatkan peluang dan potensi yang tersedia di daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pembangunan di daerah.

Tujuan rancangan kemitraan ini adalah untuk meningkatkan koordinasi dan kerjasama antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan pelabuhan

pangkalan, TPI dan kapal penangkapan ikan, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan serta meningkatkan kesejahteraan nelayan dan masyarakat pesisir.

Dalam mencapai output pada Triwulan I berikut merupakan progress atau capaian yang telah dilakukan:

- Tinjauan Lapangan Pengelolaan Sumber Daya Ikan di Sulawesi Utara;
- Telah dicapai kesepakatan DKP provinsi seluruh Indonesia mendukung peraturan penangkapan ikan terukur, bersepakat untuk tidak mengeluarkan perizinan usaha perikanan tangkap yang baru kecuali untuk kapal berukuran di bawah 5 GT.

Pencapaian yang diperoleh pada Triwulan I memiliki faktor pendukung yaitu Keterlibatan pemangku kepentingan yang dapat bekerjasama dengan baik dalam pelaksanaannya.

Namun terdapat kendala atau hambatan yang terjadi yaitu kemitraan pusat dan daerah dalam melaksanakan implementasi penangkapan ikan terukur diantaranya kapasitas kelembagaan di tingkat daerah masih sangat terbatas dalam mengimplementasikan kebijakan, sumber daya manusia yang kurang kompeten, serta tingkat kepatuhan yang masih kurang baik.

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan berikutnya:

- Perlu dilakukan evaluasi untuk penyiapan penerapan kebijakan PIT selama masa relaksasi;
- Perlu dilakukan pengawalan dana bagi hasil penerimaan perikanan untuk kelayakan fasilitas pelabuhan perikanan milik provinsi.

d) Koordinasi Revitalisasi Kawasan Tambak Udang dan Bandeng

Pada pelaksanaan isu strategis koordinasi revitalisasi tambak udang dan bandeng, output antara yang telah disampaikan risalah rapat koordinasi inisiasi pembentukan komisi irigasi.

Berikut merupakan progress atau capaian pada Triwulan I:

- Telah dilakukan rapat koordinasi inisiasi pembentukan komisi irigasi dengan pembahasan keterlibatan poklina dan laporan dari perwakil pemerintah daerah masing-masing lokasi;
- Telah ditetapkan keputusan gubernur jawa tengah mengenai komisi irigasi provinsi jawa tengah.

Faktor pendukung dari ketercapaian pada Triwulan I yaitu adanya keikutsertaan stakeholder terkait seperti KKP, Kemendagri, Gubernur Jawa Tengah, DKP dan Bappeda.

Akan tetapi terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

- belum ada justifikasi kewajiban/urgensi untuk memasukkan sektor perikanan secara khusus poklina kedalam komisi irigasi provinsi;
- perlu adanya keterlibatan poklina didalam komisi irigasi sehingga ada koordinasi dengan poklina dan komir.

Berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya yaitu:

- Secara prinsip kegiatan pertambakan termasuk sebagai program prioritas nasional. Produksi udang ditargetkan hingga 2 juta Ton, untuk itu diperlukan dukungan dari Komisi irigasi agar air irigasi yang diterima oleh usaha pertambakan lebih memadai. Karena bagaimanapun juga air adalah komponen utama keberhasilan usaha pertambakan;
- Surat justifikasi agar memasukan sektor perikanan kedalam komisi irigasi akan segera disiapkan. Nantinya surat tersebut dapat digunakan sebagai rujukan serta kesepahaman langkah antar stakeholder, serta diharapkan juga Bappeda serta dinas lain juga dapat menilai bahwa usaha pertambakan merupakan sektor penting yang juga perlu mendapat dukungan;
- Koordinasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pemeliharaan jaringan irigasi tambak merupakan tanggung jawab bersama pengelola dan pengguna air irigasi.
- Pentingnya data peta skema jaringan irigasi tambak yang detail dan informatif sebagai dasar untuk pengelolaan irigasi tambak (IGT).

e) Koordinasi Kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional

Pada pelaksanaan isu strategis Koordinasi Kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional, output antara yang telah disampaikan adalah laporan kinerja koordinasi kemitraan untuk mendukung Agenda Pembangunan Biru Nasional.

Pemerintah Indonesia berkomitmen kuat untuk mengembangkan Agenda Biru Nasional untuk mendorong kerja sama dalam pembangunan sumber daya maritim dan kelautan yang berkelanjutan untuk pertumbuhan dan kesejahteraan manusia yang adil, inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia memandang ekonomi biru sebagai instrumen penting untuk pertumbuhan ekonomi masa depan dan bagian yang tidak terpisahkan dari transformasi ekonomi Indonesia untuk Visi Indonesia 2045. Selain itu, Pemerintah

Indonesia – yang dikoordinasikan oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas – saat ini tengah memfinalisasi Peta Jalan Ekonomi Biru Indonesia, di mana penciptaan nilai, inklusivitas dan keberlanjutan merupakan unsur utama ekonomi biru.

Berikut merupakan capaian atau progress yang telah dilakukan pada Triwulan I yaitu:

- Pada triwulan pertama pelaksanaan National Blue Agenda Actions Partnership (NBAAP), telah dicapai beberapa kemajuan penting:
- Peluncuran Proyek Kelautan Berkelanjutan: Proyek-proyek ini dirancang dan diluncurkan untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Indonesia (NBAAP).
- Pertemuan Blue Finance Task Force: Membahas kemajuan dan rencana untuk ekonomi biru Indonesia, dengan fokus pada pengembangan kebijakan, kerangka kerja, dan metode pembiayaan inovatif untuk mencapai kontribusi 12,5% terhadap PDB sesuai dengan Visi 2045 (NBAAP).
- Kunjungan Forum Blue Food: Peserta dari Forum Blue Food mengunjungi Lombok Timur, berfokus pada ekowisata dan pengelolaan sumber daya perikanan (NBAAP).
- Field Trip Task Force Blue Health: Melakukan kunjungan lapangan ke Papua Barat Daya untuk meningkatkan kesehatan ekosistem laut Indonesia melalui kolaborasi berbasis ilmu pengetahuan dan keterlibatan komunitas lokal (NBAAP).

Faktor pendukung ketercapaian pada Triwulan I yaitu:

- Komitmen Pemerintah: Dukungan kuat dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) dan kementerian terkait lainnya memastikan pelaksanaan agenda ini mendapat prioritas tinggi (NBAAP).
- Kolaborasi dengan Mitra Internasional: Kerjasama dengan PBB dan mitra pembangunan internasional telah membantu memperkuat implementasi agenda biru melalui dukungan teknis dan finansial (NBAAP).

Namun pada pelaksanaannya terdapat kendala pada progress capaiannya yaitu:

- Pendanaan Berkelanjutan: Pengamanan dana jangka panjang untuk Sekretariat NBAAP masih menjadi tantangan utama, memerlukan strategi komprehensif untuk memanfaatkan sumber pendanaan beragam setelah empat tahun pertama (NBAAP).
- Koordinasi dan Sinkronisasi: Diperlukan peningkatan dalam koordinasi dan sinkronisasi antara berbagai proyek dan inisiatif agar sesuai dengan RPJMN dan komitmen internasional Indonesia (NBAAP).

- Infrastruktur Pendukung: Keterbatasan infrastruktur di beberapa daerah yang menghambat pelaksanaan proyek kelautan dan perikanan berkelanjutan (NBAAP).

Berikut tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan selanjutnya yaitu:

- Membentuk dana perwalian multi-mitra dan mengembangkan strategi pendanaan lima hingga sepuluh tahun untuk memastikan keberlanjutan program (NBAAP).
- Mengembangkan strategi komunikasi untuk setiap pilar NBAAP dan mengatur pertemuan rutin untuk meningkatkan kolaborasi antar pemangku kepentingan (NBAAP).
- Menetapkan kerangka hukum yang jelas dan struktur tata kelola formal untuk memastikan keberlanjutan jangka panjang setiap pilar NBAAP (NBAAP).

f) Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam

Pada pelaksanaan isu strategis Koordinasi Kerja Sama Eksplorasi Laut Dalam, output antara yang telah disampaikan adalah laporan rapat koordinasi persiapan kerja sama OceanX: Indonesia Exploration Mission IEM 2024.

Berikut merupakan capaian/progress yang telah dilakukan selama Triwulan I untuk mendukung capaiannya sebagai berikut:

- Telah dilakukan rapat koordinasi persiapan kerja sama oceanx: indonesia exploration mission (IEM) 2024; dan
- Telah dilakukan penyusunan rencana kerja mengenai Ekspedisi Indonesia Exploration Mission 2024;
- Rakor Penyusunan Tim Kerja Pelaksanaan Kerja Sama Ekplorasi Laut, Edukasi Publik dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Maritim;
- Rakor Teknis detail program Riset, Edukasi dan Media IEM 2024;
- Rakor Persiapan Kegiatan Young Explorer Program.

Dalam pelaksanaan capaian dari Koordinasi kerja sama eksplorasi laut dalam didukung oleh koordinasi dengan K/L terkait seperti BRIN, BMKG, Pushidrosal dan Bappenas.

Namun terdapat kendala dalam pelaksanaannya yaitu:

- Terdapat beberapa dokumen yang perlu dilengkapi untuk perizinan kapal research maupun peneliti dengan K/L terkait.

Untuk selanjutnya tindak lanjut yang akan dilakukan yaitu:

- Perlu dilakukan rapat koordinasi dengan K/L terkait dengan perizinan research

- Perlu dibuat port planning pelaksanaan IEM 2024
- Pelaksanaan Press Conference terkait IEM 2024
- Pelaksanaan floating school dan edukasi

g) Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara.

Pada pelaksanaan isu Koordinasi Peningkatan Tata Kelola Industri Kelapa Sawit dan Optimalisasi Penerimaan Negara, dicapai output yaitu terbitnya sebagian besar SK tagih untuk penyelesaian PS 110A, Penyelesaian tumpang tindih HGU dan Kawasan Hutan, dan Terdatanya sawit rakyat sebagai upaya mempercepat penerbitan e-STDB minimal di 10 Provinsi.

Berikut merupakan kegiatan atau progress yang telah dilakukan pada Triwulan I sebagai berikut:

- Pengawasan penerbitan SK Tagih Pasal 110A dan Pasal 110B;
- Penyelesaian tumpang tindih HGU dan Kawasan Hutan.

Namun dalam pelaksanaannya terdapat kendala yang dilalui yaitu:

- Keterbatasan data akurat, lambatnya koordinasi antar lembaga;
- Kurangnya tenaga terampil, waktu verifikasi yang lama;
- Ketidakselarasan data;
- Birokrasi kompleks, regulasi berubah-ubah, sulitnya akses lokasi, dan
- Rendahnya partisipasi pemilik sawit menjadi kendala utama.

Untuk selanjutnya berikut merupakan tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan II yaitu:

- Pendampingan pemenuhan plasma terlaksana di 6 provinsi, pendataan sawit rakyat untuk percepatan penerbitan e-STDB dilakukan di 10 provinsi;
- Piloting pendanaan PSR terlaksana, dan sebagian besar SK Tagih untuk Penyelesaian Ps 110B telah terbit.

h) Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut di Indonesia.

Pada pelaksanaan isu strategis Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan Kabel Bawah Laut, pada Triwulan I telah dicapai output antara yaitu Dokumen Hasil Rapat Pembahasan Revisi Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan terkait Penyelenggaraan Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.

Dalam mencapai output Triwulan I berikut merupakan capaian atau progress yang telah dilakukan:

- Telah dilakukan Rakor Monev Timnas Pipa Kabel;

- Rakor Pengarah Tim Nasional Pengelolaan Penyelenggaraan Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;
- Rapat Paparan Terintegrasi Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;
- Site Visit Terintegrasi Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut;
- Rapat Audiensi Pipa dan/atau kabel Bawah Laut.

Dalam mencapai target yang dilakukan pada Triwulan I terdapat faktor pendukung yaitu koordinasi yang baik antara K/L terkait seperti KKP, Bappenas, dan Pushidrosal.

Namun dalam pencapaian target tersebut terdapat beberapa kendala yaitu:

- Anggaran untuk kegiatan revisi KepmenKP belum direncanakan oleh unit kerja di Ditjen Pengelolaan Ruang Laut KKP, dikarenakan rencana revisi KepmenKP 14/2021 dan KepmenKP 42/2022 belum masuk ke dalam Prosun Kepmen KKP Tahun 2024;
- Keterbatasan jumlah aparatur/personil unit Asdep PRLP untuk mengimbangi padatnya jadwal kegiatan rutin Timnas;
- Waktu untuk pelaksanaan sosialisasi proses bisnis penyelenggaraan alur pipa dan/atau kabel bawah laut belum disepakati, karena padatnya agenda masing-masing instansi sehingga kegiatan sosialisasi yang semula direncanakan pada TW I akan dijadwalkan kembali pada TW II dengan mengikuti kesediaan waktu Tim Pelaksana (Eselon I).

Tindak lanjut yang dilakukan selanjutnya yaitu:

- Sosialisasi proses bisnis penyelenggaraan pipa dan/atau kabel bawah laut.
- Konsinyasi penyusunan dokumen teknis revisi koridor alur pipa dan/atau kabel bawah laut nasional.
- Rapat koordinasi Tim Pelaksana (Eselon I) dan Tim Pengarah (Menteri) terkait rencana penetapan revisi koridor alur pipa dan/atau kabel bawah laut nasional.

i) Pengembangan Large Scale Seaweed Farming Terintegrasi Hulu – Hilir.

Pada pelaksanaan isu strategis Pengembangan *Large Scale Seaweed Farming* Terintegrasi Hulu – Hilir, pada Triwulan I output antara yang disampaikan yaitu laporan progress tindak lanjut penyelesaian permasalahan industri rumput laut nasional dan Dokumen kajian (Baseline) dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan usaha budidaya rumput laut skala besar.

Berikut merupakan progress atau capaian yang telah dilakukan untuk mendukung output capaiannya:

- Rakor Koordinasi Pelaporan Progress Dukungan Kebijakan/Program Lintas K/L terkait Pengembangan Industri Rumput Laut Nasional Kepada Presiden RI;

- Rapat Koordinasi Penyusunan Kajian Dampak Sosial, Ekonomi, dan Lingkungan Usaha Budidaya Rumput Laut Skala Besar (Baseline).

Dalam mencapai capaian pada Triwulan I terdapat faktor pendukung yaitu adanya koordinasi yang baik dengan K/L terkait seperti KKP, Kemendagri, dan Bappenas.

Namun dalam capainya terdapat kendala yang dihadapi yaitu Belum ada kajian mendetail terkait Kelembagaan International Tropical Seaweed Research Center.

Tindak lanjut yang akan dilakukan pada Triwulan II yaitu Soft Launching International Tropical Seaweed Research Center di Bali saat event WWF.

3.1.3 Sasaran Strategis 3 (SS.3)

Terwujudnya Tata Kelola Kelembagaan Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang efektif dan efisien

5. Indikator Kinerja 5 adalah **“Nilai PMPZI Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”**

PMPZI adalah alat evaluasi yang digunakan oleh instansi pemerintah di Indonesia untuk menilai pelaksanaan Zona Integritas di lingkungan mereka. Zona Integritas adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen) untuk mewujudkan birokrasi yang bersih dan melayani. Tujuannya adalah untuk mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik serta pencegahan korupsi di lingkungan pemerintahan.

Penilaian PMPZI (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas) biasanya dilakukan pada triwulan kedua dan keempat. Penilaian ini mencakup berbagai aspek, termasuk:

- Manajemen Perubahan: Mengukur kemampuan organisasi dalam melaksanakan perubahan yang berkelanjutan.
- Penataan Tata Laksana: Mengukur efektivitas dan efisiensi prosedur operasional.
- Penataan Sistem Manajemen SDM: Mengukur pengelolaan sumber daya manusia dalam organisasi.
- Penguatan Akuntabilitas: Mengukur tanggung jawab dan transparansi organisasi dalam menjalankan tugasnya.
- Penguatan Pengawasan: Mengukur efektivitas pengawasan internal dan eksternal terhadap kinerja organisasi.
- Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik: Mengukur kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat.

Hasil penilaian PMPZI digunakan untuk mengidentifikasi area yang perlu perbaikan dan sebagai dasar untuk membuat rencana aksi perbaikan berkelanjutan.

Pada Triwulan I Progress yang dilaksanakan dalam pemenuhan nilai PMPZI yaitu penyusunan draft SK tim PMPZI Lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim serta telah disusun rencana kerja dari persiapan penilaian ZI Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim. Untuk selanjutnya pada triwulan II akan dilakukan implementasi dari pelaksanaan PMPZI

6. Indikator Kinerja 6 adalah **“Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim”**

Dalam mencapai Nilai SAKIP Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, yang ditargetkan pada Triwulan III Tahun 2024, penilaian evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berdasarkan 4 komponen yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Evaluasi Internal. 4 komponen tersebut dengan total bobot 100%. Pada Triwulan I telah dilakukan Perencanaan Kinerja yaitu penandatanganan dokumen Perjanjian Kinerja di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim, tidak hanya dokumen perjanjian akan tetapi telah disusun dokumen rencana aksi dalam melakukan kegiatan periode 2024 untuk mendukung tujuan organisasi.

Untuk triwulan II akan dilakukan penyusunan dokumen perencanaan dan monitoring evaluasi Triwulan II

3.2. Efisiensi Sumber Daya

3.2.1. Efisiensi Anggaran

Pelaksanaan program dan kegiatan lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Tahun 2024 didukung dengan anggaran sebesar Rp 16.500.000.000,-. Lalu kemudian Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim mendapatkan Automatic Adjustement sebesar Rp. 2.021.895.000,- sehingga pagu efektif Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim TA 2023 adalah Rp. 14.478.105.000,-

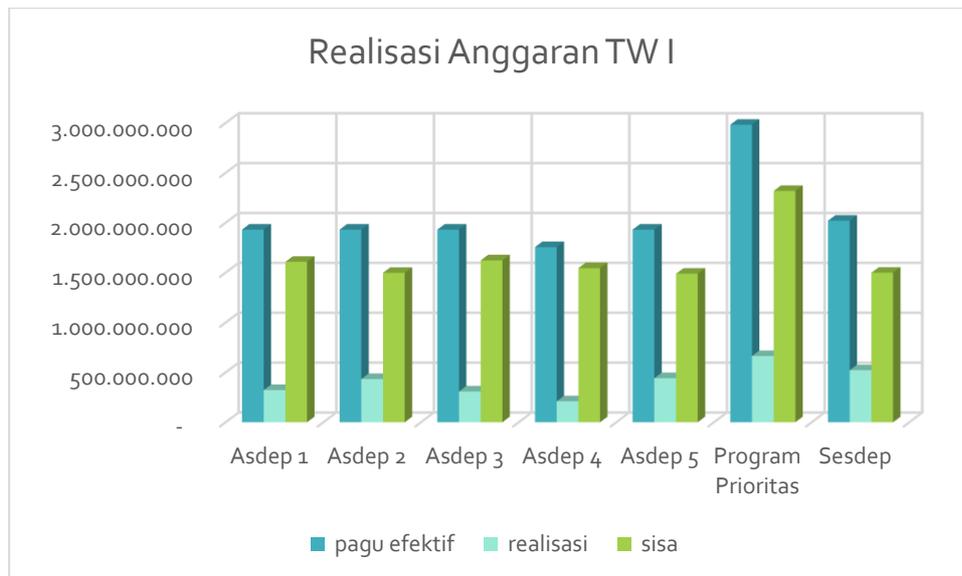
NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
1	Koordinasi Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000
2	Koordinasi Pengelolaan Perikanan Tangkap	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000
3	Koordinasi Pengembangan Perikanan Budidaya	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000
4	Koordinasi Peningkatan Daya Saing	Rp. 2.000.000.000,-	Rp245.075.000,-	1.754.925.000
5	Koordinasi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp269.585.000,-	1.930.415.000

NO	KEGIATAN	ANGGARAN	BLOKIR	PAGU EFEKTIF
6	Koordinasi Pelaksanaan Proyek Prioritas Strategis Nasional Bidang Sumber Daya Maritim	Rp. 3.500.000.000,-	Rp518.480.000,-	2.981.520.000
7	Pelayanan Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	Rp. 2.200.000.000,-	Rp180.000.000,-	2.020.000.000
	JUMLAH ANGGARAN	Rp. 16.500.000.000,-	Rp. 2.021.895.000,-	Rp14.478.105.000

Capaian realisasi Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim Triwulan I Tahun 2024 sebesar Rp. **2.236.321.842,-** atau **15,45%** dari total anggaran dengan rincian sebagai berikut:

ket	pagu efektif	realisasi	sis	%
Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim (4831 dan 5601)	14.478.105.000	2.236.321.842	14.478.104.985	15,45
4831 Koordinasi Sumber Daya Maritim	12.458.105.000	1.714.905.814	10.743.199.186	13,77
Asisten Deputy Pengelolaan Ruang Laut dan Pesisir	1.930.415.000	322.484.264	1.607.930.736	16,71
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	705.221.000	122.943.911	582.277.089	17,43
Pengendalian Kebijakan Perencanaan Ruang Laut Daerah dan Kawasan Laut	624.448.000	175.102.006	449.345.994	28,04
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Jasa Kelautan	600.746.000	24.438.347	576.307.653	4,07
Asisten Deputy Pengelolaan Perikanan Tangkap	1.930.415.000	433.101.245	1.497.313.755	22,44
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Perikanan Tangkap	546.447.000	110.434.933	436.012.067	20,21
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Ikan dan Wilayah Pengelolaan Perikanan (WPP)	728.595.000	222.223.572	506.371.428	30,50
Pengendalian Kebijakan Pengembangan SDM Perikanan Tangkap	455.373.000	99.842.740	355.530.260	21,93
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Pendanaan Biru Berkelanjutan	200.000.000	600.000	199.400.000	0,30
Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya	1.930.415.000	307.715.902	1.622.699.098	15,94
Pengendalian Kebijakan Akselerasi Produksi dan Revitalisasi Tambak Udang	554.850.000	7.648.401	547.201.599	1,38
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Klaster Budidaya Unggulan	560.291.000	237.108.079	323.182.921	42,32
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Penyediaan Input Unggul dan Sarana Produksi Perikanan Budidaya	531.519.000	29.579.909	501.939.091	5,57
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pengembangan Industri Rumput Laut Terintegrasi	283.755.000	33.379.513	250.375.487	11,76
Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing	1.754.925.000	209.952.268	1.544.972.732	11,96
Pengendalian Kebijakan Pengelolaan Logistik Produk Kelautan dan Perikanan	650.000.000	77.351.292	572.648.708	11,90

ket	pagu efektif	realisasi	sis	%
Pengendalian Kebijakan Peningkatan Jaminan Mutu Produk Kelautan dan Perikanan	404.925.000	35.502.658	369.422.342	8,77
Pengendalian Kebijakan Penguatan Pemasaran Produk Kelautan dan Perikanan	700.000.000	97.098.318	602.901.682	13,87
Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim	1.930.415.000	441.652.135	1.488.762.865	22,88
Pengendalian Kebijakan Industri Pergaraman	800.000.000	97.221.182	702.778.818	12,15
Pengendalian Kebijakan Pengembangan Industri Pengolahan Produk Perikanan dan Jaminan Usahanya	273.642.000	100.946.193	172.695.807	36,89
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Riset dan Kerjasama dalam Penguatan Hilirisasi Sumber Daya Maritim	500.000.000	193.677.760	306.322.240	38,74
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Pelaksanaan Kerja Sama Ekplorasi Laut, Edukasi Publik dan Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Maritim	356.773.000	49.807.000	306.966.000	13,96
Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.981.520.000	663.394.596	2.318.125.404	22,25
Pengendalian Proyek Prioritas Strategis Nasional (Major Project) Bidang Sumber Daya Maritim	1.981.520.000	663.394.596	1.318.125.404	33,48
Koordinasi dan Sinkronisasi Kebijakan Kelautan Global (Ocean 20)	1.000.000.000	0	1.000.000.000	-
5601 Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	2.020.000.000	521.416.028	1.498.583.972	25,81
Layanan Reformasi Birokrasi Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	400.000.000	171.546.609	228.453.391	42,89
Layanan Persuratan dan Tata Usaha Internal Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	970.000.000	342.802.919	627.197.081	35,34
Layanan Perencanaan Program dan Anggaran Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	300.000.000	1.880.000	298.120.000	0,63
Laporan Pengelolaan Kinerja Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	200.000.000	5.186.500	194.813.500	2,59
Laporan Kegiatan Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim	150.000.000	0	150.000.000	-



Dari data realisasi anggaran tersebut dapat diketahui bahwa realisasi anggaran pada Triwulan I tertinggi yaitu pada Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim sebesar 25,81%. Selanjutnya realisasi tertinggi pada Triwulan I yaitu Asisten Deputy Hilirisasi Sumber Daya Maritim dengan realisasi sebesar 22,88%. Realisasi yang dilakukan pada Triwulan I guna mendukung capaian atau progress kegiatan pada Triwulan berjalan.

3.2.2. Efisiensi Sumber Daya Manusia

Kondisi sumber daya manusia di lingkup Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim hingga akhir Triwulan I adalah sebagai berikut:

1. Eselon I : 1 orang (sudah terisi);
2. Eselon II : 3 orang (3 kosong);
3. Jabatan Fungsional Ahli Madya:13 orang (4 kosong);
4. Jabatan Fungsional Ahli Muda: 2 orang
5. Jabatan Fungsional Ahli Pertama:18 orang;
6. Pelaksana:8 orang;
7. Tenaga Pendukung Menko: 4 orang;
8. Tenaga Kerja Kontrak: 8 orang.

Pada akhir triwulan I 2024, terdapat 3 (tiga) posisi Jabatan Eselon II kosong serta 4 (empat) Fungsional Ahli Madya kosong yaitu:

- a. Asisten Deputy Pengembangan Perikanan Budidaya yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana tugas;
- b. Asisten Deputy Peningkatan Daya Saing yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana tugas;
- c. Sekretariat Deputy Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim yang saat ini masih diisi oleh Pelaksana tugas;

- d. Untuk fungsional ahli madya 1 orang di Asisten Deputi Pengelolaan Perikanan Tangkap, 1 orang fungsional ahli madya di Asisten Deputi Pengembangan Perikanan Budidaya dan 2 orang fungsional ahli madya di Asisten Deputi Hilirisasi Sumber Daya Maritim.

Walaupun masih terdapat posisi Jabatan Fungsional yang belum terisi, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim tetap berupaya mempertahankan capaian kinerja yang ada. Peningkatan kualitas sumber daya manusia terus dilakukan melalui program diklat, pelatihan maupun Workshop.

3.2.3. Efisiensi Teknologi Informasi dan Komunikasi

Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja dari kegiatan operasional sehari-hari diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Aplikasi Srikandi (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi) untuk kearsipan dan persuratan;
2. Aplikasi SAKTI (Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi) untuk keuangan;
3. Aplikasi MyASN dan E-Kinerja Badan Kepegawaian Negara untuk kepegawaian;
4. Aplikasi SIK-M dan E-Monev Bappenas untuk monitoring kinerja;
5. Marves Core, Marves HR, Cloud Maritim dan Webmail Maritim untuk akun personal kedinasan pegawai.

3.2.4. Efisiensi Sarana dan Prasarana

Data sarana dan prasarana berstatus Barang Milik Negara (BMN) yang digunakan pada Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim disampaikan sebagai berikut:

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
Laptop	31	<ul style="list-style-type: none"> • 26 baik • 3 kurang baik • 1 rusak ringan
Printer	5	<ul style="list-style-type: none"> • 4 baik • 1 rusak ringan
Scanner	2	<ul style="list-style-type: none"> • 1 kurang baik • 1 rusak
Web Cam	1	Baik
Kamera	5	Baik
Mesin Penghitung Uang	1	Baik

Jenis Barang	Jumlah	Kondisi
Mesin Penghancur Kerta	1	Baik
LCD Proyektor Portable	2	Baik
Proyektor Permanen	2	Baik
TV	10	Baik
Kendaraan R4	2	Baik
Kendaraan R2	1	Baik
Kulkas	3	Baik
Microwave	1	Baik
Dispanser	1	Baik

4. PENUTUP

Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan selama Triwulan I Tahun 2024 ini merupakan program yang disusun sebagai pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2020, dan perjanjian kinerja. Pelaksanaan kegiatan sebagian besar telah mencapai target dari apa yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja (PK). Tercapainya target pada tiap kegiatan tidak berarti tanpa masalah dan kendala dalam pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan selama Triwulan I Tahun 2024, Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim melakukan tugas dan fungsi sesuai fungsi Koordinasi, Sinkronisasi, Pengendalian pada Kementerian/ Lembaga dan *stakeholders* yang menjadi mitra dalam rangka tercapainya fungsi kelembagaan. Sebagai tindak lanjut dari kegiatan/program yang telah terlaksana pada Triwulan I Tahun 2024, maka perlu adanya dorongan percepatan dan peningkatan kinerja dalam rangka mempercepat kebijakan atau rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh *stakeholders* terkait. Selain kerja sama dengan pihak eksternal, penting juga adanya peningkatan kerja sama internal untuk mewujudkan sinergisitas yang lebih baik lagi di Lingkup Deputi Bidang Koordinasi Sumber Daya Maritim.